

5

MENYAMBUT MUSIM SEMI RADIKALISME

Produksi Guru PAI di Jakarta dan Banten

Ahmad Salehudin

Pendahuluan

DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Jawa Barat merupakan daerah di Indonesia yang seringkali dianggap sebagai potret dari rendahnya intoleransi di Indonesia, sebagaimana tercermin dari *release* Setara Institute tahun 2015 dan tahun 2017. Fenomena ini seolah-olah mengonfirmasi publikasi *The New York Times* pada tahun 2012, yang berjudul “*Indonesia’s Rising Religious Intolerance*,” yaitu Indonesia yang dikenal sebagai negara yang plural, toleran, dan damai, lambat laun berubah menjadi cenderung intoleran dan radikal. Ada pengerasan sikap keberagaman terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, baik atas nama Negara, maupun kelompok-kelompok masyarakat.

Di Kota Serang, Provinsi Banten misalnya, rendahnya intoleransi dapat dilihat ketika penjual warung makan, Saeni, hanya bisa menangis ketika dagangannya disita aparat Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Serang, pada Jumat, 10 Juni 2016, karena dianggap melanggar aturan dalam Surat Edaran Pemerintah Kota Serang mengenai larangan warung buka siang hari di Bulan Suci Ramadan. Pada Oktober 2016, sejumlah ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Banten menolak pelantikan Listyo Sigit

Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten menggantikan Ahmad Dofiri, karena agama Listyo Sigit Prabowo berbeda dengan keyakinan mayoritas penduduk Banten beragama Islam (PT Viva Media Baru, 2016). Jauh sebelumnya, pada tahun 2003 patung pahlawan nasional Sultan Ageng Tirtayasa yang berada di simpang Kebon Jahe, Kota Serang dibongkar. Salah satu alasan yang muncul saat itu adalah kekhawatiran menguatnya pengkultusan terhadap Sultan Ageng Tirtayasa yang dapat berujung pada perbuatan syirik, yaitu “menyembah” Sultan Ageng Tirtayasa baik sadar atau tidak sadar (Rifa'i, 2018).

Pada tahun 2017, hajatan Pilgub menyebabkan terjadinya penguatan intoleransi dan politisasi identitas keagamaan di DKI menjelang, saat, dan setelah Pilgub 2017. Kondisi ini menyebabkan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia. Sebenarnya, jejak intoleransi keagamaan di Jakarta dapat ditelusuri dari penolakan warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang mayoritas Muslim terhadap Lurah Susan Jasmine Zulkifli yang beragama non Islam pada tahun 2013 (Kuwado, 2013). Sikap intoleransi masyarakat DKI Jakarta semakin menguat ketika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menggantikan Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta. Penolakan Ahok menjadi Gubernur DKI dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI). Mereka menghimbau kepada seluruh umat Islam Jakarta, habaib, kiai, ormas Islam, ormas Betawi, pondok pesantren, majelis taklim, mahasiswa, dan tokoh masyarakat untuk mengikuti ‘Aksi Akbar’ menolak Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta (Rochmanuddin, 2014). Selama proses kampanye Pilgub DKI 2017, intoleransi keagamaan di Jakarta menjadi semakin menguat dan mengeras. Kelompok-kelompok yang sebelumnya menolak Ahok menjadi Gubernur DKI karena beragama Kristen, dalam perkembangannya juga menolak dan memusuhi orang-orang Islam yang menjadi pendukung Ahok, misalnya pelarangan salat jenazah bagi pendukung Ahok atau sejumlah kasus persekusi yang lainnya (Tempo.co, 2017).

Merupakan sebuah kenyataan bahwa kota-kota dengan tingkat toleransi rendah, seperti Jakarta, Depok, Tangerang, dan Serang memangku keberadaan prodi-prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menjadi sasaran penelitian ini, yaitu Prodi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (selanjutnya ditulis PAI UIN Syarif Hidayatullah), Prodi PAI Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Jakarta (selanjutnya ditulis PAI UMJ), dan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (selanjutnya ditulis PAI SMH Banten). Mahasiswi dan mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ berada pada kondisi rentan untuk terpapar sikap islamisme, intoleransi, dan radikalisme. Ketiga perguruan tinggi tersebut berada pada simpang arus wacana intoleransi, tidak saja karena secara geografis berada di daerah-daerah yang memiliki tingkat toleransi rendah, tetapi juga karena para mahasiswa hidup dan sebagian besar berasal dari daerah-daerah tersebut.

Ada tiga kondisi kerentanan yang dihadapi oleh mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah, UIN SMH Banten, dan UMI. *Pertama*, kerentanan pergaulan. Dengan berada pada titik silang pergaulan dengan daerah-daerah yang memiliki tingkat toleransi rendah, bukan mustahil mereka akan dengan mudah terpapar sikap intoleran keagamaan. Dalam masyarakat yang intoleran, setiap individu yang berada di dalamnya akan mendapatkan internalisasi nilai-nilai yang juga intoleran. Cara individu merespons sangat dipengaruhi kemampuan masing individu dalam menyikapi. Dengan kata lain, individu yang hidup dalam masyarakat intoleran memiliki potensi besar untuk juga menjadi intoleran.

Kedua, kerentanan sosial-budaya. Mereka yang sudah memiliki sikap intoleran terhadap perbedaan dengan sendirinya akan mengalami kerentanan sosial-budaya. Mereka akan cenderung enggan untuk bergaul dengan pihak yang berbeda dan menganggap yang berbeda sebagai ancaman. Salah satu contohnya adalah merasa tidak nyaman jika memiliki tetangga yang berbeda agama, tidak mengizinkan agama lain mendirikan rumah ibadah di dekat rumahnya, dan --dalam kontestasi politik pemerintahan-- tidak mau dipimpin oleh mereka yang berbeda agama, sebagaimana penolakan terhadap pimpinan polisi di Banten dan lurah di Jakarta karena menganut agama yang berbeda dari kelompok mayoritas.

Ketiga, kerentanan agama. Mereka yang berbudaya intoleran dan secara sosial budaya terasing dari komunitasnya semakin rentan untuk terpapar paham keagamaan radikal. Mereka tidak saja akan mudah dipengaruhi dengan paham-paham tertentu, tetapi akan secara aktif mencari ideologi-ideologi yang mereka butuhkan atau dianggap sesuai dengan kebutuhan mereka. Keterpaparan tidak semata-mata karena mereka menerima paham-paham keagamaan secara pasif, tetapi juga karena secara aktif mencarinya untuk memenuhi kebutuhan pengetahuannya.

Merujuk hasil survei The Wahid Foundation, ada indikasi intoleransi dan radikalisme di kalangan umat Islam di Indonesia cenderung meningkat. Kecenderungan ini dapat dilihat dari tren kenaikan sikap intoleran terhadap kelompok yang tidak disukai berdasarkan etnis, preferensi seksual dan organisasi menjadi 49% dari yang sebelumnya "hanya" 38,4% (Hafiz, 2018). Selain intoleransi level individual, kecenderungan peningkatan intoleransi juga terjadi pada (kelembagaan) ormas, yaitu dari 230 organisasi masyarakat, terdapat 147 organisasi diidentifikasi sebagai intoleran, 49 memiliki kecenderungan radikal, dan 34 organisasi terindikasi kuat sebagai kelompok teror (Hafiz, 2018). Fenomena yang disampaikan oleh The Wahid Foundation sangat penting namun sekaligus mengkhawatirkan. Dikatakan penting karena dapat menjadi dasar merumuskan kebijakan untuk mengantisipasi agar pertumbuhannya dapat dikurangi atau "dilayukan" sama sekali, namun pada sisi yang lain juga mengkhawatirkan karena bertumbuhnya kelompok intoleran yang laksana cendawan dimusim penghujan memberikan indikasi bahwa ada perubahan narasi keagamaan di kalangan generasi muda Islam Indonesia. Nampaknya, ada perubahan tren selera "berislam" anak-anak muda Islam Indonesia dari Islam ala masakan rumahan menjadi *fast food*.

Intoleransi dan radikalisme tidak selalu berujung kepada gerakan terorisme, tetapi semua terorisme selalu berangkat dari intoleransi dan radikalisme. Seperti halnya perempuan yang memilih bercadar, mereka tidak serta merta dapat dikatakan intoleran, radikal, dan bahkan terorisme. Namun, terorisme biasanya dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung oleh mereka yang menggunakan cadar. Dikatakan langsung artinya mereka melakukannya sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur (Chairunnisa, 2018) atau penusukan terhadap anggota Brimob di Kelapa Dua Depok yang dilakukan dua orang perempuan yang juga menggunakan cadar (Setiawan, 2018). Sedangkan dikatakan tidak langsung karena mereka menjadi pihak yang mendukung kegiatan teror tersebut, misalnya menjadi istri para pelaku teror yang sebagian besar bercadar (Tribun, 2018). Tentu saja, fenomena perempuan bercadar harus disikapi secara hati-hati agar tidak terjebak dalam generalisasi, misalnya menganggap bahwa cadar merupakan identitas teroris. Faktanya, banyak perempuan bercadar yang bukan teroris. Cadar merupakan ruang multi tafsir sehingga perlu hati-hati melihatnya: apakah sebagai ekspresi kesalehan beragama, identitas teologis, atau simbol dari ideologi perlawanan yang menjadi titik berangkat terorisme.

Dalam konteks keindonesiaan, munculnya tren baru berpakaian dengan cadar yang menjadi simbolisme dari pola keberagaman baru di Indonesia perlu disikapi secara cermat dan hati-hati. Pakaian dengan cadar—dengan menggunakan teori Geertz (1973) tentang simbolisme agama—merupakan pengejawantahan dari sebuah etos. Sebagai simbol etos, maka pakaian tidak dapat lagi dilihat sebagai aksesoris penutup tubuh belaka, misalnya agar penampilan menjadi lebih baik dan anggun, tetapi menyimpan nilai-nilai dari ideologi tertentu. Melalui pakaian yang dikenakan dapat diketahui ideologi apa yang terbungkus dalam tubuh pemilik pakaian tersebut, baik disadari atau tidak disadari oleh pemiliknya. Tindakan orang beragama, walaupun dalam derajat ketebalan yang berbeda, merupakan manifestasi dari pemahaman dan penghayatan agamanya, baik yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar (Salehudin, 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi sangat strategis untuk melihat keberadaan PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, dan PALUMJ. Ada tiga alasan yang mendasari. *Pertama*, sebagai pusat produksi calon guru PAI, tentu menjadi sangat menarik untuk melihat bagaimana ketiga prodi tersebut merespons fenomena meningkatnya intoleransi yang terjadi di lingkungan mereka dengan mempersiapkan calon guru agama Islam yang memiliki pengetahuan keislaman yang mendalam. *Kedua*, calon guru PAI merupakan anak-anak muda yang cukup rentan terpapar intoleransi. Terbukanya akses informasi yang cukup luas memungkinkan mereka tidak saja menyerap pengetahuan agama dari kampus, tetapi juga secara bebas dan mandiri untuk menerima dan mencari, serta menambah pengetahuan agama dari keluasan teknologi informasi. *Ketiga*, untuk menakar kapasitas calon guru PAI yang secara langsung atau tidak langsung akan mendidik dan melakukan transmisi keislaman di kalangan masyarakat. Peran guru PAI

dalam transmisi keislaman tidak saja menjadi transmitter bagi siswa-siswi di sekolah, tetapi juga menjadi pengayom bagi masyarakatnya.

Menakar Asa Prodi PAI

Ada dua Prodi PAI Negeri dan satu prodi swasta yang menjadi subjek penelitian simpul Jakarta, yaitu PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ. Khusus untuk yang PAI Swasta, pada awalnya direncanakan Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu al Quran (IIQ) Jakarta (selanjutnya ditulis PAI IIQ Jakarta). Pada awalnya, PAI IIQ Jakarta bersedia untuk diteliti, sehingga kuesioner disebarkan ke mahasiswi. Namun ketika hendak ditindak lanjuti untuk pengumpulan data kuesioner dan interview dosen, pihak dekanat Fakultas Tarbiyah IIQ menyatakan tidak bersedia menjadi responden penelitian melalui surat Dekan Nomor: 019.3/DFT/IX/2018 tertanggal 18 September 2018. Dalam suratnya tersebut, Dekan IIQ tidak menjelaskan mengapa tidak bersedia menjadi responden penelitian. Namun terkait data kuesioner mahasiswa, dekan mengizinkan untuk tetap digunakan. Dengan demikian, data kuesioner dari PAI IIQ Jakarta akan tetap digunakan, terutama sebagai pembanding untuk subjek-subjek yang sama dengan tiga Prodi PAI lainnya.

Prodi IIQ kemudian diganti dengan Prodi PAI UMJ. Ada dua pertimbangan yang menjadi dasarnya. *Pertama*, jumlah mahasiswa PAI UMJ, yaitu rata-rata 5 kelas per angkatan dengan jumlah masing-masing kelas 40an mahasiswa. *Kedua*, menjadi representasi pendidikan kader dakwah dari ormas Islam yang moderat. Dalam konteks kontestasi ideologi keislaman, PAI UMJ memiliki peran strategis tidak saja untuk menghasilkan guru PAI secara formal, tetapi juga menghasilkan kader dakwah yang menjadi *transmitter* Islam moderat yang terbingkai dalam keislaman dan kemuhammadiyah. *Ketiga*, secara praktis, PAI UMJ dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru di sekolah-sekolah yang berada dalam naungan Muhammadiyah, walau tidak menutup kemungkinan juga untuk memenuhi kebutuhan sekolah umum atau madrasah.

PAI UIN Syarif Hidayatullah

Dalam rentang sejarah panjang keberadaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi PAI rata-rata merupakan prodi tertua, tidak saja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi juga di Indonesia. Saat ini, Prodi PAI merupakan satu dari 12 prodi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dari 58 prodi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan melihat sejarah tersebut, dapat dipastikan bahwa Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki kiprah yang sangat tebal dan mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah terakreditasi BANPT dengan nilai A, serta telah terakreditasi AUNQA.

Visi	Misi	Komptensi
Menjadi <i>center of excellence</i> dalam bidang pendidikan agama Islam di tingkat ASEAN dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, keilmuan dan keindonesiaan.	Menyelenggarakan pendidikan akademik yang profesional inovatif dan efektif di bidang pendidikan Islam; Melakukan penelitian inovatif dalam bidang pendidikan dan studi Islam; Memberikan pelatihan dan konsultasi untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan Asia tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidik pendidikan agama Islam di sekolah dan di madrasah. Alumni PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat melaksanakan (a) Pendidikan di sekolah di semua tingkatan SD SMP dan SMA; dan (b) Pendidikan di madrasah semua jenjang MI, MTS, dan MA. 2) Peneliti pendidikan agama Islam, yaitu dengan kategori: (a) peneliti permasalahan pendidikan agama Islam; dan (b) peneliti buku buku pendidikan agama Islam. 3) Konsultan pendidikan agama Islam. Mereka diharapkan menjadi (a) konsultan pendidikan agama Islam di sekolah dan di madrasah, dan (b) konsultan pendidikan agama Islam di masyarakat

Gambar 5.1: Matriks Visi Misi Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

PAI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) FITK SMH Banten bertujuan menghasilkan Sarjana Pendidikan Islam berkualitas dan profesional yang dilandasi keluhuran akhlak serta mampu berperan dalam mengembangkan ilmu pendidikan agama Islam di masyarakat. Jurusan PAI berstatus terakreditasi dengan nilai B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 004/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2015.

Sedangkan profil lulusan yang diharapkan adalah: (1) Sarjana Pendidikan Islam berkualitas yang mampu berkompetisi dalam skala lokal, nasional dan global; (2) Sarjana Pendidikan Islam yang memiliki keahlian profesi keguruan bidang PAI untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK; (3) Sarjana Pendidikan Islam yang mempunyai dasar-dasar keilmuan pendidikan; (4) Sarjana Pendidikan Islam yang mampu mengintegrasikan konsep-konsep pendidikan dengan konsep-konsep agama Islam; (5) Sarjana Pendidikan Islam yang mampu melakukan penelitian bidang pembelajaran pendidikan agama Islam; (6) Sarjana Pendidikan Islam yang mampu berperan sebagai guru Bimbingan dan Konseling di sekolah/madrasah.

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Keberadaan UMJ merupakan tindak lanjut dari keputusan konferensi Majelis Pengajaran Muhammadiyah yang diadakan di Pekalongan untuk mendirikan Fakultas Hukum dan

Visi	Misi	Komptensi
Menjadi Jurusan terkemuka dan unggul di Indonesia dalam menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam yang mengembangkan dan mengintegrasikan aspek keislaman, keilmuan, kemanusiaan dan ke-Indonesiaan pada tahun 2020	Menjadikan pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu yang melandasi penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pendekatan trans-disiplinary. Menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Pengembangan Pendidikan Profesi untuk menghasilkan tenaga pendidikan dan kependidikan. Melaksanakan penelitian dan kajian pengembangan ilmu pendidikan dan keislaman. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penyebaran dan pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Menjalin kerja sama dan menyediakan informasi sebagai rujukan bagi stakeholders dalam bidang pendidikan dan keislaman.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjadikan tenaga pendidik yang profesional dalam bidang Pendidikan Agama Islam; 2) Menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial dilandasi nilai-nilai akhlakul karimah; 3) Menghasilkan karya-karya penelitian dan inovasi dalam bidang pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh stake holders; 4) Menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi kepada masyarakat dalam penyebaran dan pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan Agama Islam; 5) Membangun kerja sama dalam skala nasional, regional maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atas dasar prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguatkan.

Gambar 5.2: Matriks Visi Misi Prodi PAI UIN SMH Banten

Falsafah di Padang Panjang. Fakultas ini kemudian secara resmi dibuka pada tanggal 3 Rabi'ul akhir 1375 H atau tanggal 18 November 1955. Pada tahun 1956, fakultas ini dipindahkan ke Jakarta dengan nama baru, yakni perguruan tinggi pendidikan guru (PTPG), yang diresmikan pada tanggal 18 November 1975.

Pada 1958, PTPG Muhammadiyah dirubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan berada di bawah lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Pada tanggal 21 September 1961, dibuka Fakultas Kesejahteraan Sosial (FKS) yang diprakarsai oleh Menteri Sosial Mulyadi Djojomartono. Selanjutnya pada tahun 1962, dibuka Fakultas Tarbiyah, dan pada tahun 1963 dibuka 3 (Tiga) fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 1963, UMJ dikukuhkan pendiriannya melalui Akte Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo di Jakarta.

Saat ini UMJ telah memiliki 9 (Sembilan) Fakultas dengan 43 Program Studi, meliputi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, dan kesehatan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ilmu Keperawatan serta sekolah Pasca

Visi	Misi	Komptensi
Menjadi program studi agama Islam yang bermutu tingkat nasional tahun 2025 yang dapat mencetak tenaga pendidik Agama Islam Profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis kurikulum yang integratif memadukan tradisi keilmuan dan al-Islam Kemuhammadiyahah sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan profesional sosial dan berkepribadian islami; 2) Menyelenggarakan program pembelajaran yang bermutu dan tepat guna untuk dapat mencetak lulusan yang berkualifikasi dan profesionalisme sebagai tenaga pendidik agama Islam; 3) Memberikan layanan akademik dan non akademik yang prima kepada seluruh mahasiswa program studi pendidikan agama Islam; 4) Mengimplementasikan dan mengoptimalkan sistem penjaminan mutu prodi untuk menjamin kualitas akademik dan non akademik; 5) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kinerja program studi pendidikan agama Islam; 6) Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam bidang pendidikan agama Islam dengan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 7) Meletakkan tata kelola program studi secara demokratis transparan dan akuntabel; 8) Mempertinggi dan menggembirakan pendidikan karakter islami sehingga terwujudnya sikap perilaku mahasiswa pendidikan agama Islam sesuai dengan nilai-nilai al-Islam Kemuhammadiyahah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan guru pendidikan agama Islam yang profesional berbeda Dian islami serta memiliki kompetensi akademik pedagogik sosial kepemimpinan dan terampil yang bekerja di lingkungan sekolah madrasah dan lembaga pendidikan dan pelatihan; 2) Menyiapkan tenaga pendidik PKI yang memiliki akidah Islam dan wawasan keilmuan Al-Islam dan kemuhammadiyahah yang kuat sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai guru PAI di sekolah dan madrasah yang menguasai bidang keahliannya cakap dan percaya diri serta berguna bagi masyarakat; 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan kependidikan Islam dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia; 4) Mengembangkan keilmuan pendidikan Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan diridhoi Allah SWT.

Gambar 5.3: Matriks Visi Misi Prodi PAI UM Jakarta

Sarjana, yang memiliki sejumlah program magister, meliputi Magister Ilmu Hukum, Magister Studi Islam, Magister Manajemen, Magister Ilmu Administrasi, Magister akuntansi, Magister Kesehatan Masyarakat, dan Magister Ilmu Keperawatan. Prodi PAI merupakan satu dari 43 prodi di UMJ.

Profil lulusan Prodi PAI UMJ secara garis besar terdiri dari profil utama dan profil tambahan. Profil utama lulusan adalah pendidik mata pelajaran pendidikan agama Islam pada MTS SMP SMA SMK yang berkepribadian baik berpengetahuan luas dan mutakhir berkemampuan dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang mendidik dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas berlandaskan etika keilmuan profesi dan Al Islam kemuhammadiyah. Sedangkan, profil tambahan yang diharapkan adalah setiap lulusan program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam SMH Banten memiliki kompetensi tambahan sebagai: (1) pendakwah atau *muballigh-muballighah*; (2) *Leadership* atau berjiwa kepemimpinan; (3) *Entrepreneurship* atau berjiwa kewirausahaan; dan (4) Manajerial.

Kompetensi lulusan Prodi PAI UMJ wajib memiliki pengetahuan umum sebagai berikut: (1). Memiliki pengetahuan tentang al-Islam kemuhammadiyah filsafat Pancasila kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi; (2) Mampu mengemukakan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik). (3) Memiliki kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik). (4) Memiliki kemampuan dalam berpikir kritis logis kreatif inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik; (5) Memiliki pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama *Rahmatan Lil Alamin*; (6). Memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan terkait dengan integrasi keilmuan, keislaman, dan kemuhammadiyah sebagai paradigma keilmuan; (7). Mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan nilai-nilai *al-Islam* kemuhammadiyah.

Sedangkan pengetahuan khusus yang harus dimiliki oleh sarjana lulusan PAI UMJ adalah: (1) Ilmu-ilmu keagamaan: kemampuan dalam penguasaan pengetahuan tentang konsep ilmu agama Islam yang meliputi aspek-aspek akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah serta kajian analisis dalil-dalil naqli dan aqli yang mendasarinya dari Alquran dan hadis; (2) Ilmu-ilmu pedagogis: kemampuan dalam penguasaan pengetahuan tentang konsep-konsep ilmu mendidik baik konsep secara umum maupun konsep pendidikan menurut persepsi Islam serta analisis teori dan pandangan klasik dan modern tentang teori dan praktik pendidikan; (3) Ilmu-ilmu pembelajaran pendidikan agama Islam: kemampuan dalam penguasaan pengetahuan tentang konsepsi keilmuan yang mendasari interaksi pembelajaran di kelas serta analisis teori dan praktik tentang berbagai aspek pendukung

proses pembelajaran baik yang bersifat manusiawi maupun material untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam; (4) Instrumen keilmuan pendidikan Islam: kemampuan dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan menerapkan metode ilmiah untuk pengembangan keilmuan pendidikan agama Islam secara ilmiah serta memupuk sikap-sikap ilmiah yang mendukung pengembangan keilmuan yang mencerahkan wawasan masyarakat.

Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh Sarjana Strata Satu Prodi PAI Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah: (1) Mampu menerapkan pemikiran logis kritis sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu dan terukur; (3) Mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan desain atau kritik seni; (4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; (5). Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penjelasan masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data; (3) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; (7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; (8). Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; (9) Mampu mendokumentasikan menyimpan mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi; dan (10) Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja.

Pengetahuan khusus yang harus dimiliki oleh lulusan program sarjana PAI Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah: (1) Terampil menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran PAI secara baik dan tepat sesuai kerangka dan prosedur; (2) Terampil mengembangkan kurikulum operasional dan mengembangkan materi ajar yang kontekstual dalam pembelajaran PAI; (3) Terampil menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran PAI yang mendidik efektif menyenangkan dan bermutu; (4) Terampil mendesain alat media bahan ajar dan sumber pembelajaran yang relevan bermakna dan mendidik; (5) Terampil menyusun instrumen melaksanakan dan mengolah hasil penilaian secara manual maupun berbasis sistem aplikasi; (6) Terampil melaksanakan perbaikan pembelajaran secara berkesinambungan melalui tindakan reflektif dan lesson studies.

Sangkar Emas Prodi PAI: Membonsai Potensi

Berdasarkan visi, misi dan tujuan dari Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah, Prodi PAI

UIN SMH Banten, dan Prodi PAI UMJ sebagaimana telah disebutkan di atas, keberadaan Prodi PAI merupakan pengejawantahan dari semangat untuk menjadi lembaga pendidikan Islam unggul, yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, keilmuan, kemanusiaan, dan keindonesiaan, sehingga mampu melahirkan guru PAI yang profesional. Profesional dalam konteks ini bukan hanya mampu mengajar secara baik dengan metode yang canggih, tetapi juga memiliki pengetahuan keislaman yang luas dan mendalam dalam rangka menopang kemanusiaan, dan keindonesiaan. Apabila kerangka ideal ini yang berjalan, tentu tidak akan ditemukan adanya guru PAI yang disinyalir terpapar sikap intoleransi dan radikalisme sebagaimana ditemukan dalam survei yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah (Sitepu, 2018). Sungguh ironis jika temuan PPIM tersebut benar: Guru PAI yang seharusnya menjadi benteng dan pemutus mata rantai intoleransi keagamaan malah menjadi *transmitter*-nya.

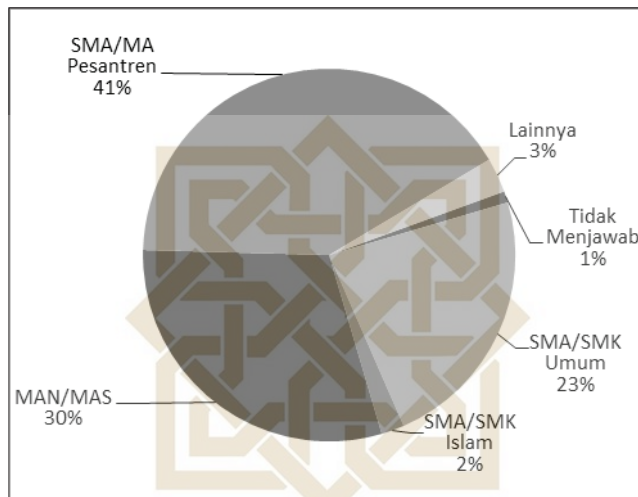
Guru PAI dilahirkan oleh sistem yang memproduksinya. Hanya saja, sikap intoleran dan radikal tersebut tidak sertamerta dibentuk oleh Prodi PAI, tetapi dibentuk oleh banyak faktor yang berkait-kelindan saling mempengaruhi. Guru PAI merupakan pribadi-pribadi aktif yang tidak saja secara pasif menerima nilai-nilai yang datang kepada dirinya, tetapi juga secara aktif dan kreatif mencari nilai-nilai yang sesuai dan dibutuhkan oleh dirinya; termasuk dalam hal ini pola keislamannya. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih dalam apakah pola keislamannya dibentuk oleh Prodi PAI atau faktor-faktor lainnya.

Sebagai sebuah sistem produksi guru, Prodi PAI tidak cukup hanya dilihat pada ranah idealitas sebagaimana terangkai dalam visi, misi, tujuan, dan kompetensi ideal yang dirumuskan, tetapi juga harus memperhatikan ranah realitas, yaitu faktor-faktor lain yang menjadi penopang berjalannya sistem produksi tersebut, seperti (1) input mahasiswa, (2) kapasitas dosen, (3) kurikulum pembelajaran, dan (4) sumber-sumber informasi keagamaan lain yang mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung, terhadap proses pencapaian kompetensi (profesional, substansial, sosial, dan emosional) calon guru PAI dalam ruang produksinya.

Tersesat di Jalan yang Salah: Raw Input Mahasiswa

“Prodi PAI berupaya untuk mencetak ustaz dan ustazah,” suara itu yang terdengar cukup nyaring disuarakan para dosen Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah, Prodi PAI UIN SMH, dan Prodi PAI UMJ. Hal ini tampak lumrah didengar karena seyogyanya para alumni Prodi PAI ketika kembali ke masyarakat tidak semata-mata mengajarkan Agama Islam kepada anak didiknya di sekolah, tetapi juga menjadi *suluh* dan pembimbing keagamaan di masyarakatnya; atau dengan kata lain seorang guru PAI ideal merupakan para ustaz-ustazah yang memiliki kecakapan mengajar. Secara akademik, dengan mempertimbangkan jumlah peminat dan ketatnya persaingan, mereka yang diterima di Prodi PAI tentu memiliki kualifikasi akademik unggul sehingga mampu menyisihkan peminat lainnya. Problemnya adalah kualifikasi unggul secara akademik tidak

sertamerta menjadi jaminan memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman keislaman yang komprehensif, sehingga ketika lulus dari PAI menjadi merupakan ustaz-ustazah (baca: sarjana dengan pengetahuan dan pemahaman Islam) yang memiliki kompetensi mengajar. Di sinilah *raw input* mahasiswa perlu mendapat perhatian.



Gambar 5.4: Latar Belakang Sekolah Mahasiswa PAI

Sedikitnya ada empat hal yang perlu diperhatikan ketika membahas tentang *raw input* mahasiswa PAI dalam konteks menghasilkan sarjana Pendidikan Agama Islam sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan tujuan masing-masing prodi, yaitu latar belakang pendidikan mahasiswa PAI, jalur seleksi masuk, kemampuan berbahasa Arab, dan motivasi menjadi mahasiswa PAI. *Pertama*, latar belakang pendidikan mahasiswa PAI. Dari empat Prodi PAI yang disurvei, 23% mahasiswa PAI berasal dari SMAN/SMA/SMKN/SMK (sekolah umum), 73% berasal dari MAN/MA/SMA/MA Pesantren (atau dianggap memiliki bekal keagamaan), dan 4% sisanya tidak menjawab dan menjawab lain-lain. Jika dilihat dari masing-masing prodi, latarbelakang pendidikan mahasiswa Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah sebanyak 77% berasal MAN/MA/SMA/MA Pesantren, 18% berasal dari SMAN/SMA/SMKN/SMK, dan lain-lain 5%; mahasiswa Prodi PAI UIN SMH sebanyak 63% berasal dari MAN/MA/SMA/MA Pesantren, 31% dari SMAN/SMA/SMKN/SMK, 4% tidak menjawab, dan 2% menjawab lainnya; mahasiswa Prodi PAI UMJ sebanyak 72% berasal dari MAN/MA/SMA/MA Pesantren, 25% dari SMAN/SMA/SMKN/SMK, dan 2% lainnya; sedangkan mahasiswa Prodi PAI IIQ Jakarta sebanyak 78% berasal dari MAN/MA/SMA/MA Pesantren (57% berasal dari MA dan SMK pesantren), 20% dari SMAN/SMA/SMKN/SMK, dan 2% menjawab lainnya. Informasi tentang latar belakang sekolah cukup bermanfaat untuk mengetahui kompetensi dasar (modal pengetahuan keagamaan) calon mahasiswa Prodi PAI yang diproyeksikan menjadi guru Agama Islam.

Adanya data bahwa 23% (atau 27% jika ditambahkan dengan mereka yang tidak menjawab atau menjawab lain-lain) mahasiswa PAI berasal dari sekolah umum (SMAN/SMA/SMKN/SMK) harus dibaca cermat dan hati-hati, artinya ada 27% dari mahasiswa PAI yang berpotensi tidak memiliki modal (baca: latarbelakang pengetahuan dan pemahaman) keislaman yang memadai untuk menjadi guru PAI. Namun demikian, bukan berarti yang 73% sisanya yang berasal dari MAN/MA/SMA/MA Pesantren memiliki modal pemahaman dan pengetahuan Islam yang mencukupi, karena sebagaimana disampaikan oleh salah satu dosen, ada mahasiswa yang berlatar belakang SMA Pondok Pesantren juga tidak mampu membaca al-Quran dengan lancar. “Ada lho yang membaca *a la ma*, dari yang seharusnya *alif laamm miim*, atau *a la ra* dari yang seharusnya *alif lamm ra*”, ungkapnyanya dalam sesi wawancara.

Pengelola prodi tampaknya menyadari bahwa sekitar 30-40% mahasiswanya memiliki pemahaman dan pengetahuan agama Islam yang minimalis atau tidak standar untuk menjadi guru PAI. Hal ini dapat dilihat dari adanya kurikulum standarisasi pemahaman dan pengetahuan agama, seperti matakuliah praktikum *qiraah*, *kitabah*, dan *ibadah* di PAI UMJ; matakuliah Praktikum *Qiraat* di PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan mata kuliah *qira'atul qur'an wa tahfidz* (qqwt) di PAI UIN SMH Banten. Tentu saja, keberadaan mahasiswa PAI yang kurang memiliki dasar-dasar keislaman memadai, bukan kesalahan pengelola Prodi PAI, karena mereka pada dasarnya hanya “menerima” secara pasif mahasiswa yang telah lulus dari sistem ujian masuk.

Mereka yang memiliki pemahaman dan pengetahuan keislaman memadai tentu dapat diharapkan menjadi guru PAI yang memiliki pengetahuan dan pemahaman keislaman yang komprehensif dan mendalam sebagaimana tercantum dalam visi, misi, dan tujuan prodi, tetapi bagaimana dengan mereka yang kemampuannya minimalis? Jawaban dari pertanyaan ini cukup mudah, tetapi menjadi rumit ketika dikaitkan dengan realitas sosial bahwa mereka yang menyandang gelar Sarjana Pendidikan Islam seyogyanya telah memiliki “ijin” untuk menjadi guru agama Islam. Ijazah yang dipegang oleh masing-masing alumni PAI merupakan ijin untuk menjadi guru (ustaz atau ustazah), tanpa perlu dipertanyakan lagi apakah mereka memiliki pengetahuan keislaman yang memadai atau tidak sama sekali. Hal seperti ini yang menjadi kegelisahan beberapa dosen PAI ketika disodori adanya penelitian bahwa banyak guru PAI yang tidak *qualified* untuk mengajar. Mereka mengatakan perlunya penelusuran lebih jauh latar belakang pendidikan mereka, apakah alumni PAI atau bukan, karena di lapangan banyak guru PAI yang bukan alumni PAI. Selain itu, jika guru PAI tersebut memang alumni PAI, maka perlu juga ditelusuri asal-muasal perguruannya.

Jika guru PAI tidak memiliki pengetahuan keislaman yang memadai, kira-kira pengetahuan agama Islam seperti apakah yang akan mereka ajarkan kepada murid-muridnya. Atau pemahaman keagamaan seperti apa yang akan mereka transmisikan kepada anak didiknya? Jika pertanyaannya dilanjutkan, dari mana mereka akan mendapatkan bahan-bahan untuk mengajar? Akan menjadi bermasalah jika referensi

yang digunakan oleh guru PAI tersebut bersumber dari sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti internet dan group media sosial (medsos).

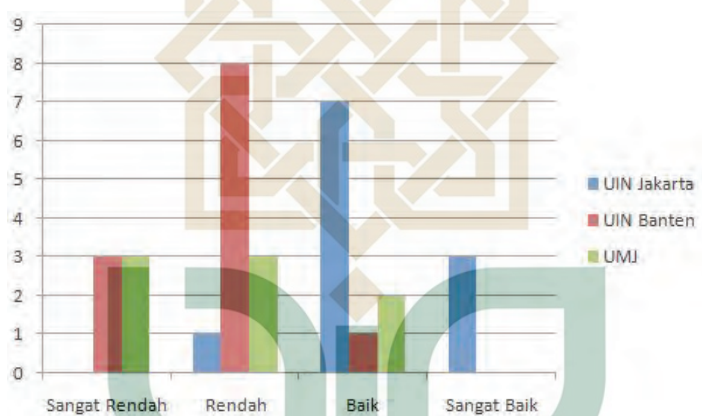
Kedua, seleksi masuk. Banyaknya jalur untuk menjadi mahasiswa PAI disinyalir menjadi salah satu biang keladi munculnya masalah di PAI, terutama yang terjadi di PAI PTKIN. Proses seleksi bersama di PTKIN yang hanya melihat kepada kompetensi akademik calon mahasiswa, baik yang berdasarkan nilai rapor (UAN) ataupun hasil ujian tes tulis dianggap oleh banyak kalangan belum mampu menjadi penyaring yang mumpuni untuk mendapatkan kandidat calon guru PAI. Prodi PAI hanya menjadi pihak yang “pasif” terkait siapa saja yang boleh diterima dan berapa jumlah mahasiswa setiap tahunnya yang akan diterima. Mungkin saja, secara akademik yang terekam dalam rapor dan/atau tersaji dalam hasil tes tulis ujian masuk si calon mahasiswa memiliki potensi akademik tinggi, tetapi akan bermasalah jika tidak memiliki bekal dasar keislaman yang memadai. Hal seperti ini yang dialami oleh PAI UIN Syarif Hidayatullah dan PAI UIN SMH Banten, di mana sekitar 30% mahasiswanya memiliki pengetahuan keislaman yang rendah. Hal serupa juga dialami PAI UMJ. Walaupun memiliki kesempatan untuk mendapatkan calon mahasiswa terbaik melalui tes yang dilakukan secara mandiri, faktanya hal tersebut cukup sulit dilakukan karena mereka yang mendaftar adakalanya sudah tidak diterima di kampus negeri. Selain itu, mereka juga terbebani untuk menerima banyak mahasiswa sebagai penopang kehidupan dan keberlanjutan operasional kampus.

Ketiga, kemampuan berbahasa Arab. Bagi calon guru agama Islam atau calon ustaz-ustazah, mampu berbahasa arab adalah persyaratan mutlak. Dengan memiliki kemampuan berbahasa Arab, mahasiswa akan mampu mengakses pengetahuan keislaman langsung kepada sumber-sumber utamanya. Berdasarkan tes tulis kemampuan bahasa Arab mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, Prodi PAI UMJ yang mengikuti *Focus Grup Discussion* (FGD), didapatkan data sebagai berikut: Dari ketiga Prodi PAI yang dilakukan tes tulis, 19% mahasiswa PAI berkemampuan bahasa Arab sangat rendah, 39% rendah, 32% baik, dan 10 % sangat baik. Sedangkan jika dirinci per prodi, akan didapatkan data sebagai berikut: Kemampuan bahasa Arab mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah: Rendah 9%, Baik 64%, dan sangat Baik 27%; kemampuan bahasa Arab mahasiswa PAI UIN SMH Banten: Sangat Rendah 25%, Rendah 67%, dan Baik 8%; Sedangkan kemampuan bahasa Arab mahasiswa PAI UMJ adalah: Sangat Rendah 37%, Rendah 38%, dan Baik 25%. Dengan melihat hasil tes tersebut, dapat diketahui bahwa lebih dari 50% mahasiswa Prodi PAI memiliki kemampuan bahasa Arab rendah. Kemampuan bahasa arab yang rendah memiliki dampak terhadap dua hal, yaitu untuk mendapatkan pengetahuan keislaman dari sumber-sumber utama, dan melakukan verifikasi atas informasi-informasi keislaman yang didapatkan.

Secara umum, mahasiswa PAI menganggap bahwa sangat penting mahasiswa PAI menguasai bahasa Arab. Mereka kemudian mengambil kursus bahasa Arab atau tinggal di pondok pesantren. Namun ada juga mahasiswa yang beranggapan bahwa seiring perkembangan teknologi dan informasi kemampuan berbahasa Arab tidak terlalu penting,

karena saat ini materi-materi keislaman sudah banyak terjemahannya. Kemampuan berbahasa Arab berkaitan dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman keislaman. Mereka yang memiliki kemampuan berbahasa Arab mumpuni tentu akan mampu memperdalam, mengembangkan, dan “mengklarifikasi” pengetahuan dan pemahaman keislaman dengan mengakses sumber-sumber keislaman yang berbahasa Arab secara langsung, tidak sekadar menerima dari hasil interpretasi orang lain. Hal ini tentu berbeda dengan guru PAI yang memiliki kemampuan bahasa Arab rendah. Mereka akan sangat bergantung kepada hasil terjemahan atau pada buku-buku berbahasa Indonesia, sehingga akan kesulitan untuk mengembangkan dan mengakses beragam pemikiran keislaman.

Dosen-dosen PAI secara umum menganggap bahwa minimnya penguasaan



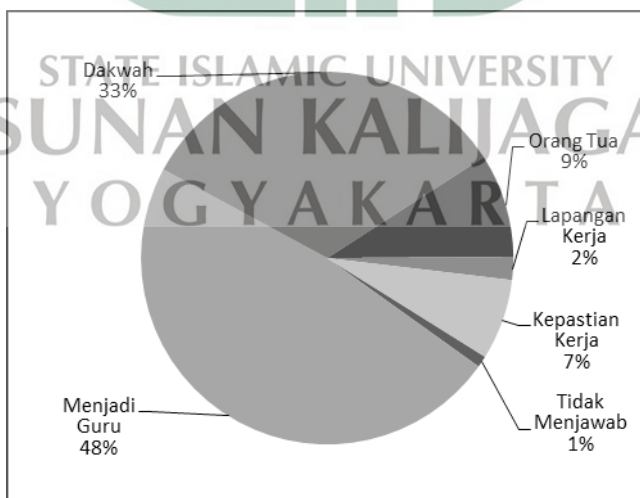
Gambar 5.5: Kemampuan Bahasa Arab mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ

bahasa Arab mahasiswa sangat mengganggu dalam penyampaian materi pelajaran. Namun, para dosen tersebut tidak berdaya untuk menerapkan aturan secara ketat karena terbentur oleh sistem pendidikan yang mengharuskan semua mahasiswa harus lulus. Secara umum, ada tiga arus besar dosen dalam memandang pentingnya bahasa Arab. *Satu*, dosen PAI yang menganggap bahwa mahasiswa PAI harus mampu memahami teks berbahasa Arab. Mereka kemudian merumuskan pembelajaran yang mengharuskan mahasiswa membaca teks-teks berbahasa Arab, dan menjadikan kemampuan membaca dan memahami teks berbahasa Arab sebagai parameter kelulusan. Dosen dengan tipe ini menganggap bahwa ketidakcakapan mahasiswa dalam bahasa Arab sangat mengganggu proses pembelajaran. Mahasiswa yang tidak memiliki pengetahuan bahasa Arab memadai cenderung menghindari dosen-dosen dengan tipe ini. *Dua*, dosen PAI yang menganggap bahwa kemampuan berbahasa Arab sangat penting, namun cukup realistis dalam menyikapi kemampuan bahasa Arab mahasiswanya. *Tiga*, dosen PAI yang tidak

mempersoalkan kemampuan bahasa Arab mahasiswanya. Mereka tidak mempersoalkan karena titik tekan mereka adalah menyampaikan materi sebagaimana yang telah mereka rumuskan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).

Keempat, motivasi masuk PAI. Biasanya ada anggapan bahwa motivasi masuk Prodi PAI karena ingin menjadi guru. Anggapan ini tidak salah, namun tidak sepenuhnya akurat, karena alasan ingin menjadi guru tidak lebih dari 50%. Berdasarkan data kuisioner dari mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta diketahui bahwa sebanyak 48% ingin menjadi guru, 33% untuk dakwah dan ibadah, 9% dorongan orang tua, 7% kepastian kerja, 2% lapangan kerja, dan 1% tidak menjawab. Jika motivasi dilihat berdasarkan prodi, kita akan mendapatkan informasi yang cukup menarik. Motivasi mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah, yaitu sebanyak 37% ingin menjadi guru, 36% untuk dakwah dan ibadah, 14% dorongan orang tua, 10% kepastian kerja, dan 3% lapangan kerja. PAI UIN SMH Banten, yaitu sebanyak 56% ingin menjadi guru, 32% untuk dakwah dan ibadah, 4% dorongan orang tua, 6% kepastian kerja, dan 2% tidak menjawab. PAI UMJ, yaitu sebanyak 37% ingin menjadi guru, 42% untuk dakwah dan ibadah, 10% dorongan orang tua, 8% kepastian kerja, dan 3% lapangan kerja. Sedangkan motivasi mahasiswa PAI IIQ Jakarta, yaitu sebanyak 59% ingin menjadi guru, 23% untuk dakwah dan ibadah, 8% dorongan orang tua, 6% kepastian kerja, 2% lapangan kerja, dan tidak menjawab 2%.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa domisili asal mahasiswa berpengaruh terhadap motivasi masuk PAI. *Satu*, motivasi mahasiswa PAI yang mayoritas berasal dari daerah, sebagaimana terpotret dari mahasiswa PAI SMH Banten dan PAI IIQ Jakarta, mayoritas motivasinya untuk menjadi guru. *Kedua*, jika komposisi



Gambar 5.6: Motivasi masuk PAI

mahasiswanya berimbang antara kota dan daerah, motivasi menjadi guru cenderung berimbang dengan motivasi untuk beribadah dan berdakwah sebagaimana dapat dilihat pada mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah. *Ketiga*, jika mahasiswanya cenderung berasal dari kota, sebagaimana mahasiswa PAI UMJ, motivasi tertingginya untuk beribadah dan berdakwah.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan dua orang mahasiswi yang berlatar belakang SMK Akuntansi, mereka mengatakan bahwa masuk PAI dalam rangka tegak lurus dalam beragama, yaitu untuk beribadah. Setelah lulus SMK, mereka sebenarnya sudah kuliah di prodi akuntansi, namun kemudian berhenti setelah mendapatkan bimbingan dari lembaga kerohanian Islam (Rohis) yang mereka ikuti ketika SMK. Pada awalnya keluarga mereka menentang keinginannya untuk berhenti kuliah dari prodi akuntansi, dan merencanakan masuk PAI untuk berdakwah dan beribadah. Namun pada akhirnya keluarganya mendukung keputusan mereka untuk masuk PAI dan merajut keinginannya berdakwah.

Kapasitas Dosen PAI

Secara umum, dosen Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah, Prodi PAI UIN SMH Banten, dan Prodi PAI UMJ memiliki latar belakang pendidikan bergelar Master, Doktor, dan Profesor. Dosen PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta misalnya, memiliki 7 orang Profesor, 12 Orang Doktor, dan 13 orang Master. Para dosen yang mengampu matakuliah PAI sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan pesantren, baik pesantren tradisional maupun modern. Mahasiswa juga menganggap bahwa para dosen PAI memiliki pemahaman keislaman yang komprehensif. Menurut mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta, 97% dosen mata kuliah keislaman memiliki pengetahuan keislaman yang komprehensif, dan hanya 3% yang menyatakan tidak setuju.

Sebagai dosen PAI, mereka memiliki kemampuan berbahasa Arab dengan kategori minimal baik. Penilaian diri (subjektif) para dosen PAI terhadap keahlian mereka berbahasa Arab cukup menarik. Sebanyak 36% dosen PAI UIN Syarif Hidayatullah menganggap kemampuannya berada pada level cukup, 55% menganggap baik, dan 9% menganggap sangat baik. Dosen PAI UIN SMH Banten 20% merasa kurang, 40% merasa baik, sisanya tidak menjawab dan tidak ada yang merasa sangat baik. Dosen PAI UMJ sebanyak 70% merasa cukup, 20% merasa baik, dan 10% merasa sangat baik.

Kurikulum PAI: Mengembangkan atau Mengerdilkan?

Secara garis besar, kurikulum Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah, Prodi PAI UIN SMH, dan Prodi PAI UMJ dapat dipetakan dalam dua kompetensi besar, yaitu kompetensi Profesional (kemampuan mengajar) dan kompetensi substansial keislaman. Dengan melihat kepada kedua kompetensi tersebut dan dikaitkan dengan visi, misi dan tujuannya,

alumni Prodi PAI akan menjadi seorang *alim* dalam agama Islam (kompetensi substansi keislaman) dan memiliki skill yang canggih dalam melakukan pembelajaran. Hanya saja, pertanyaannya kemudian apakah kurikulum yang didesain sudah mampu menghasilkan calon guru PAI yang memiliki kedalaman pengetahuan dan pemahaman Islam pada satu sisi, dan kemampuan “mengajar” pada sisi yang lain.

Dalam konteks PTKI, Prodi PAI merupakan salah satu prodi dengan masuk kategori tinggi peminat. Kondisi ini memungkinkan PAI tidak saja menerima mahasiswa dan mahasiswi dalam jumlah banyak dalam setiap angkatan, tetapi juga berkesempatan memilih calon-calon mahasiswa yang memiliki kualifikasi akademik unggul. Pada dimensi ini, yaitu berkesempatan sangat bebas untuk memilih calon mahasiswa terbaik, Prodi PAI memiliki ruang sangat luas untuk merealisasikan misi dan visinya. Hal ini tentu berbeda dengan prodi-prodi di lingkungan PTKI yang sepi peminat, sehingga siapa saja yang mendaftar “seolah” harus diterima. Hal seperti ini juga berlaku dengan kampus-kampus swasta yang mendasari beban biaya operasional kampusnya dari keberadaan mahasiswa.

Ketika mahasiswa yang diterima merupakan individu terpilih, keberadaan kurikulum menjadi salah satu faktor determinan dalam membentuk lulusan Prodi PAI sesuai dengan visi dan misinya; yaitu guru Pendidikan Agama Islam yang memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam, berwawasan kebangsaan, dan memiliki kecakapan dalam proses pembelajaran. Namun banyak pihak yang beranggapan bahwa alumni Prodi PAI secara umum hanya unggul dalam kecakapan pedagogis (mengajar), sedangkan kemampuan substansial keislaman cenderung rendah. Pada posisi ini, menarik untuk mempertanyakan, ada apa dengan kurikulum PAI?

Berdasarkan wawancara dengan stakeholder dan analisis terhadap kurikulum Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah, Prodi PAI UIN SMH, dan Prodi PAI UMJ, ada tiga hal yang menjadi penyebabnya. *Pertama*, komposisi antara kompetensi pedagogis, keislaman, dan penunjang berkisar antara 50%-30%-20% atau 55%-30%-15%; 50%-55% untuk kompetensi pedagogis, 30%-35% untuk kompetensi keislaman, dan 15%-20% untuk penunjang. Khusus mata kuliah penunjang, secara umum merupakan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang harus dikuasai oleh semua mahasiswa, apapun prodinya. Dengan melihat komposisi ini, tentu dapat dipahami mengapa alumni Prodi PAI cenderung cakap dalam hal pedagogis, namun relatif kurang dalam bidang materi keislaman.

Kedua, secara aturan, pada awalnya materi PAI di desain untuk memenuhi kebutuhan guru Agama Islam pada sekolah umum. Jika mengacu pada diktum ini, tentu cukup beralasan jika kurikulum dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan “pragmatis” mengajar agama Islam di sekolah umum. Namun dalam perkembangannya, alumni Prodi PAI juga masuk menjadi guru madrasah yang membutuhkan kemampuan lebih luas dan mendalam dengan spesifikasi yang khusus, seperti al-Quran-hadis, akidah-akhlaq, sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan bahasa Arab. Dengan melihat konten dan komposisi kurikulum, tampaknya kurang tepat alumni Prodi PAI menjadi guru agama di madrasah.

MENYAMBUT MUSIM SEMI RADIKALISME
Produksi Guru PAI di Jakarta dan Banten

Mata Kuliah	SKS
Psikologi Belajar PAI	2
Fiqh Ibadah I	2
Fiqh Ibadah II	2
Materi Al Qur'an Hadits I (MI/SD)	2
Materi Al Qur'an Hadits II (MTs/SMP)	2
Materi Al-Qur'an Hadits III (MA/SMA/SMK)	2
Materi Fiqh I (MI/SD)	2
Materi Fiqh II (MTs/SMP)	2
Materi Fiqh III (MA/SMA/SMK)	2
Materi Aqidah Akhlak I (MI/SD)	2
Materi Aqidah Akhlak II (MTs/SMP)	2
Materi Aqidah Akhlak III (MA/SMA/SMK)	2
Materi SKI I (MI/SD)	2
Materi SKI II (MTs/SMP)	2
Materi SKI III (MA/SMA/SMK)	2

SEMESTER III			SEMESTER IV		
NO	KODE	MATA KULIAH	NO	KODE	MATA KULIAH
1	DM-001	Kerukunan dan Perdamaian	1	DM-001	Makna dan Tujuan Pendidikan
2	DM-002	Fiqh Manahil dan Mawaris	2	DM-002	Teknik Kurikulum PAI
3	DM-003	Keagamaan Pendidikan Islam	3	DM-003	Talim Tawakkul
4	DM-004	Keagamaan Pendidikan Islam	4	DM-004	Hadis Tawakkul
5	DM-005	Keagamaan Pendidikan Islam	5	DM-005	Fiqh-Syariat dan Hukum
6	DM-006	Pendidikan & Pengembangan	6	DM-006	Aspek Aspek di Masyarakat
7	DM-007	Keagamaan Pendidikan Islam	7	DM-007	Keagamaan Pendidikan Islam
8	DM-008	Keagamaan Pendidikan Islam	8	DM-008	Keagamaan Pendidikan Islam
9	DM-009	Keagamaan Pendidikan Islam	9	DM-009	Keagamaan Pendidikan Islam
Jumlah		21	Jumlah		21

SEMESTER V			SEMESTER VI		
NO	KODE	MATA KULIAH	NO	KODE	MATA KULIAH
1	DM-010	Perencanaan Pembelajaran	1	DM-010	Keagamaan Pendidikan Islam
2	DM-011	Keagamaan Pendidikan Islam	2	DM-011	Keagamaan Pendidikan Islam
3	DM-012	Keagamaan Pendidikan Islam	3	DM-012	Keagamaan Pendidikan Islam
4	DM-013	Keagamaan Pendidikan Islam	4	DM-013	Keagamaan Pendidikan Islam
5	DM-014	Keagamaan Pendidikan Islam	5	DM-014	Keagamaan Pendidikan Islam
6	DM-015	Keagamaan Pendidikan Islam	6	DM-015	Keagamaan Pendidikan Islam
7	DM-016	Keagamaan Pendidikan Islam	7	DM-016	Keagamaan Pendidikan Islam
8	DM-017	Keagamaan Pendidikan Islam	8	DM-017	Keagamaan Pendidikan Islam
9	DM-018	Keagamaan Pendidikan Islam	9	DM-018	Keagamaan Pendidikan Islam
Jumlah		21	Jumlah		21

3	K0610429	Pengembangan Kurikulum	2
4	K0613324	Perencanaan Pembelajaran PAI	2
5	K0613427	Pengembangan Sistem Evaluasi Pemb. PAI	2
6	K0613451	Manajemen Sekolah dan Madrasah	2
7	K0613436	Statistik Pendidikan	2
8	K0613420	Hadis-Tarbiawi	2
Jumlah			23

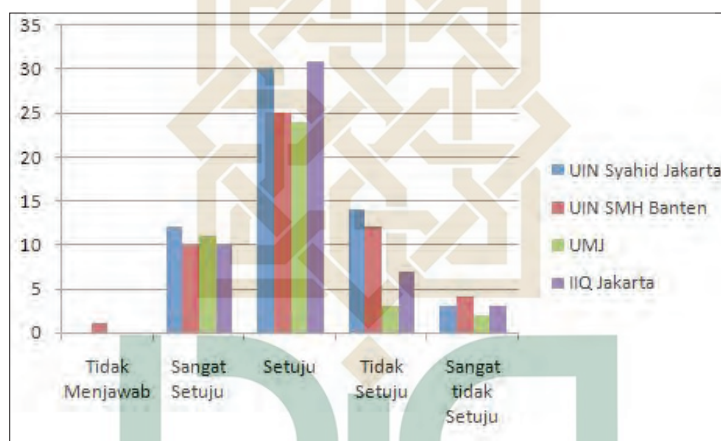
SEMESTER V		
NO.	KODE MK	MATA KULIAH
1	KD612515	Metodologi Penelitian Pendidikan
2	K0613521	Pembelajaran PAI SMP
3	K0613572	Pembelajaran PAI SMA
4	K0613531	Pembelajaran Aqidah Akhlak MTs
5	K0613533	Pembelajaran Quran Hadis MTs
6	K0613535	Pembelajaran Fiqh MTs
7	K0613577	Pembelajaran SKI MTs
8	K0612558	Pendidikan Multikultural
9	K0612443	Kewirausahaan dalam Pendidikan
Jumlah		

SEMESTER VI		
NO.	KODE MK	MATA KULIAH
1	K0614642	Praktikum Penelitian
2	K0613632	Pembelajaran Aqidah Akhlak MA
3	K0613634	Pembelajaran Quran Hadis MA
4	K0613635	Pembelajaran Fiqh MA
5	K0613638	Pembelajaran SKI MA

Gambar 5.7: Cuplikan Daftar Matakuliah PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UM Jakarta, dan PAI SMH Banten

Ketiga, materi keislaman PAI didesain untuk tidak produktif. Jika dilihat dalam struktur kurikulum, materi keislaman dibuat untuk memenuhi tuntutan mampu “mengajarkan” materi keislaman pada jenjang SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA, seperti dapat dilihat misalnya pada matakuliah Materi Al-Quran Hadits I (MI/SD), Materi Al Qur’an Hadits II (MTs/SMP), dan Materi Al-Quran Hadits III (MA/SMA/SMK). Contoh lain adalah adanya mata kuliah Materi Fiqh I untuk MI/SD, Materi Fiqh II untuk MTs/SMP, dan Materi Fiqh III untuk MA/SMA/SMK. Dalam proses wawancara disebutkan bahwa mata kuliah tersebut dalam proses revisi dan akan segera diganti dengan kurikulum baru.

Dengan melihat komposisi kurikulum sebagai penopang kompetensi pedagogis, substansial keislaman, dan penunjang tampaknya memang Prodi PAI sejak awal tidak didesain untuk menghasilkan para sarjana Pendidikan Islam yang memiliki pemahaman keislaman yang komprehensif, luas, dan mendalam untuk dapat melakukan transformasi dan transmisi nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan yang moderat, tetapi sekadar memenuhi kebutuhan pragmatis perusahaan yang bernama “sekolah” SD/MI, SMP/MTs, dan MA/SMA. PAI tampaknya berperan seperti Balai Latihan Kerja (BLK) pencetak tukang meja, bukan ahli kayu yang mampu menerka dan mengimajinasikan tentang sebuah kayu yang dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.



Gambar 5.8: Bergabung dengan grup medsos untuk menambah pengetahuan agama

Proses Pembelajaran: Ruang Semai yang Tandus

Berdasarkan penilaian mahasiswa, dosen-dosen PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta dianggap memiliki pengetahuan keislaman yang komprehensif untuk mengajar mata kuliah keislaman. Mahasiswa juga menganggap bahwa para dosen berpengaruh signifikan dalam membentuk keberagaman mereka, yaitu di atas 90%. Selain itu, mahasiswa juga sangat antusias membaca referensi yang direkomendasikan dosen, yaitu di atas 81%. Artinya, keberadaan dosen memiliki potensi signifikan dan sangat penting dalam membentuk keberagaman dan corak pengetahuan mahasiswa. Hanya saja, pada sisi yang lain, tampaknya ada sesuatu yang perlu digali lebih serius terkait pola dan intensitas interaksi dosen dan mahasiswa.

Secara fungsional, dosen memiliki pengaruh signifikan terhadap pola keberagaman dan pengetahuan mahasiswa, tetapi apakah tersedia ruang dan arena yang memadai sehingga transmisi pengetahuan dari dosen ke mahasiswa dapat berlangsung

secara baik dan produktif. Hal ini perlu dipertanyakan karena penggunaan internet untuk menambah pengetahuan agama di kalangan mahasiswa PAI relatif tinggi, yaitu mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah 49% , mahasiswa PAI UIN SMH Banten 39%, mahasiswa PAI UMJ 72%, dan mahasiswa PAI IIQ Jakarta 37%. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa mahasiswa PAI UMJ paling banyak bergantung kepada internet untuk menambah pengetahuan agamanya, diikuti PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, dan PAI IIQ Jakarta. Tingginya penggunaan internet untuk menambah pengetahuan agama mahasiswa PAI mungkin saja karena mereka tidak mendapatkannya di ruang kelas. Ruang kelas menjadi ruang tandus berseminya pemahaman keislaman yang komprehensif, *ready use*, dan sesuai perkembangan zaman. Selain itu, fenomena pemenuhan informasi agama dari internet mahasiswa PAI UIN SMH Banten, dan PAI IIQ Jakarta cukup menarik, karena ternyata mereka yang berasal dari “desa” dan berafiliasi dengan NU cenderung rendah dalam menggunakan internet sebagai sumber pengetahuan agama.

Selain menambah pengetahuan keagamaan melalui internet, mereka juga bergabung dengan grup media sosial. Mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebanyak 71%, PAI UIN SMH Banten 67%, PAI UMJ sebesar 87%, dan PAI IIQ Jakarta sebesar 80%. Mereka juga bertanya tentang masalah-masalah keagamaan di grup media sosial yang mereka ikuti dengan proporsi cukup tinggi, yaitu 40% untuk mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 40% untuk mahasiswa PAI UIN SMH Banten, 67% untuk mahasiswa PAI UMJ, dan 57% untuk mahasiswa PAI IIQ Jakarta.

Tingginya penggunaan internet untuk memperdalam pengetahuan agama mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta menunjukkan tiga hal. *Pertama*, dosen-dosen PAI cenderung sulit diakses. Peran para dosen sebenarnya cukup signifikan dalam membentuk keagamaan mahasiswa, namun karena mahasiswa sulit mengakses para dosen yang mungkin sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing, mahasiswa kemudian mencari informasi keagamaan dari internet dan media sosial lainnya. Tentu tidak masalah selama yang didapatkan dari internet atau grup-grup medsos adalah informasi keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan yang moderat, tetapi akan menjadi masalah ketika informasi yang diakses berasal dari kelompok intoleran, radikal, atau bahkan teroris.

Kedua, dosen-dosen PAI cenderung berfokus kepada materi perkuliahan sehingga abai terhadap fenomena keagamaan yang secara langsung dihadapi mahasiswa. Dalam wawancara dengan para dosen PAI, ada kecenderungan mereka hanya berfokus kepada materi perkuliahan saja dan cenderung menghindari isu-isu aktual dalam perkuliahan. Akibatnya, mahasiswa mencari sendiri pengetahuan tentang isu-isu keagamaan kontemporer di internet atau dengan mengikuti grup-grup media sosial. Tentu saja dalam kondisi demikian, keberadaan mahasiswa menjadi cukup rentan untuk terpapar intoleransi dan radikalisme. Salah seorang mahasiswi, misalnya, mengatakan bahwa pada awal-awal kuliah sampai semester lima dia mengikuti grup tahajud berantai, namun

kemudian berhenti karena grup tersebut juga digunakan untuk menyajikan informasi-informasi politik. Jika si mahasiswa memiliki nalar yang cukup kritis tentu dia dapat memfilter informasi-informasi yang diterimanya, namun jika tidak kritis akan sangat mudah untuk terpapar ideologi tertentu dari group media sosial yang diikuti.

Ketiga, melihat kondisi mahasiswa yang cenderung ingin instan, maka kemungkinan keislaman yang ditawarkan oleh para dosen terlalu sulit untuk dicerna dan diamalkan, karena kurang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam mengarungi kehidupannya. Mahasiswa sebagai generasi millennial dengan kompleksitas kehidupan yang dimiliki tentu ingin mengonsumsi ajaran agama yang mudah diamalkan dan tidak ribet, seperti yang disampaikan oleh para ustaz dan ustazah yang sering tampil di layar televisi, *youtube*, atau media sosial lainnya, seperti Ustaz Abdul Somad, Habib Rizieq Shihab, Adi Hidayat, Felix Siau, dan yang lainnya yang secara jitu mampu mengemas Islam sesuai dengan selera mereka.

Terkait tokoh-tokoh yang menjadi idola mahasiswa ini, cukup menarik melihat kecenderungan tokoh agama idola mahasiswa masing-masing PAI yang diteliti. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki tokoh-tokoh intelektual Islam yang berkaliber internasional seperti Prof. Azumardi Azra, Prof. Din Syamsuddin, dan Prof. Quraish Shihab. Namun, nama-nama beken tersebut bukan idola mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tokoh idola mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Ustadz Abdus Somad (14%), Ustadz Hanan Attaqi (8%), Ustadz Adi Hidayat (8%), Habib Rizieq Shihab (7%), dan KH Mustofa Bisri (6%).

Tokoh agama idola Mahasiswa di UIN SMH Banten berturut-turut dari yang paling populer adalah Ustadz Abdul Somad (18%), KH Hasyim Asyarie (12%), KH Ma'ruf Amin (6%), Ustadz Adi Hidayat (5%), dan Ustadz Yusuf Mansur (5%). Mahasiswa PAI UIN Banten yang mayoritas berasal dari keluarga NU tampaknya masih cukup mengenal tokoh-tokoh NU. Masuknya nama KH Hasyim Asyarie dan KH Ma'ruf Amin sebagai idola menunjukkan bahwa Banten masih tetap merupakan basis NU. Namun demikian, tetap saja mayoritas dari mereka mengidolakan Ustadz Abdul Somad yang dianggap tegas, alim, dan tidak partisan.

Sedangkan tokoh idola mahasiswa PAI UMJ berturut-turut: Ustadz Abdul Somad (21%), Habib Rizieq Shihab (12%), dan Ustadz Adi Hidayat (6%). Komposisi tokoh idola mahasiswa PAI UMJ cukup menarik karena mereka tidak "mengetahui" tokoh-tokoh Muhammadiyah, seperti KH. Ahmad Dahlan, Buya Syafi'i Ma'arif, Amin Rais, dan lainnya. "Ketidak-tahuan" mahasiswa PAI UMJ terhadap para tokoh Muhammadiyah tersebut menunjukkan terganggunya atau terputusnya transmisi keilmuan dan keislaman Muhammadiyah, dan digantikan dengan munculnya model baru keilmuan dan keislaman sebagaimana diusung oleh tokoh idola mereka.

Dengan melihat komposisi tokoh agama idola mahasiswa tersebut, dapat diteka bahwa pemikiran keislaman mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN

SMH Banten, dan PAI UMJ sedikit banyak akan sama seperti tokoh idolanya. Para pemuja akan selalu berusaha untuk mengikuti dan mengidentifikasi dirinya seperti tokoh idolanya. Hal ini yang saat ini secara perlahan namun pasti sedang berkembang di Prodi PAI. Dengan difasilitasi oleh internet dan media sosial lainnya, lambat laun para ustaz idola tersebut menggantikan peran-peran dosen dengan ruang kelasnya, dan pada saat bersamaan menyemai islamisme di kampus.

Musim Semi Radikalisme di Prodi PAI

“... Pernahkah kawan-kawan memikirkan saudara-saudara kita di Palestina? Mereka saat ini hidup dalam penindasan. Mereka dizalimi oleh Israel dan kita di sini, tidak dapat berbuat apa-apa karena terhalang oleh negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Agar kita bisa secara langsung membantu saudara-saudara kita di Palestina melawan Israel, maka mau tidak mau Indonesia harus menjadi negara Islam.”

Kata-kata tersebut diucapkan dengan suara bergetar penuh emosi oleh Dian (bukan nama sebenarnya), peserta FGD, seorang mahasiswa PAI UIN SMH Banten berperawakan tinggi agak gemuk, mengaku sudah memiliki istri, dan merupakan “mantan” aktivis HTI. Apa yang disampaikan tersebut seolah-olah menjadi pembungkus atas semua sikap dan ucapannya selama proses FGD. Dengan suara agak tinggi dan terlihat emosional, misalnya, dia menolak berpendapat dan bahkan mempertanyakan konsep radikal ketika diajukan pertanyaan bahwa berdasarkan hasil penelitian, guru-guru PAI banyak yang terpapar intoleransi dan radikalisme. Namun semangatnya untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam ternyata berbanding terbalik dengan kemampuan bahasa Arabnya. Dalam uji tulis memberikan harakat dan mengartikan teks berbahasa Arab, kemampuannya masuk kategori sangat rendah.

Fenomena yang relatif ironis tersebut secara tersirat atau tersurat menginformasikan adanya Islamisme di Prodi PAI. Islamisme sedang bersemi dan tumbuh di prodi-Prodi PAI dengan kecepatan yang berbeda-beda, misalnya mulai maraknya pakaian berjilbab besar, kajian-kajian bertema khilafah, sikap keras terhadap kelompok sempalan, dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena tersebut, baik secara tebal maupun tipis, menjadi penanda sedang bertumbuhnya Islamisme di Prodi PAI. Islamisme memasuki musim semi di Prodi PAI. Ada lima fenomena yang menarik untuk dicermati, yaitu penggunaan jilbab besar atau cadar, pandangan terhadap Syiah dan Ahmadiyah, memilih pemimpin nonmuslim, pandangan terhadap Barat, dan tentu saja tentang negara Islam.

Pertama, fenomena cadar. Perdebatan cukup keras tentang cadar bermula dari keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga (walaupun kemudian dicabut kembali) untuk melarang penggunaan cadar, yang kemudian baik secara implisit atau eksplisit diikuti oleh PTKI lainnya di Indonesia. Secara kuantitatif, jumlah mahasiswi bercadar di Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ tidak banyak, bahkan terbilang sangat sedikit, totalnya tidak lebih dari lima orang. Namun yang berjilbab lebar cukup banyak. Sangat mudah untuk menemui mahasiswi PAI

yang menggunakan jilbab besar, walaupun tentu saja jumlah yang menggunakan jilbab kecil (baca: wajar) lebih banyak. Mereka yang bercadar kebanyakan berafiliasi dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) atau sejumlah kecil dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Hal yang cukup menarik ketika berbicara tentang cadar, sebagian besar mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ menolak jika cadar dilarang. Menurut mereka, bercadar merupakan hak setiap orang untuk menjalankan agamanya.

Sedangkan para dosen PAI di tiga prodi yang diteliti cenderung berbeda pendapat. Dosen-dosen Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PAI UMJ cenderung melarang mahasiswi menggunakan cadar. Bahkan, menurut informasi dari mahasiswi, ada dosen di PAI UIN Jakarta meminta mahasiswi yang bercadar untuk melepas cadar ketika perkuliahan. Selain itu, ada juga dosen yang “mengajak berdiskusi” mahasiswi yang bercadar, untuk mengetahui mengapa mereka menggunakan cadar. Berbeda dengan dosen PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PAI UMJ, Dosen PAI UIN Sultan Maulana Hasanuddin mengatakan tidak sepakat jika ada pelarangan cadar. Bagi mereka, bercadar atau tidak merupakan pilihan bebas masing-masing individu. Dalam konteks PAI UIN Banten, munculnya kelompok-kelompok sesat, seperti kerajaan Ratu Ubur-Ubur, lebih mendapatkan perhatian daripada isu Islam fundamentalis atau Islam transnasional yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi tema diskusi yang cukup seksi, terutama jika dikaitkan dengan konteks NKRI.

Dalam proses penelitian, peneliti tidak sempat mewawancarai mahasiswi yang bercadar, namun hanya tiga orang mahasiswi menggunakan jilbab besar yang pernah berkeinginan untuk menggunakan cadar, sebut saja namanya Eva, Diyah, dan Pipin. Eva bercerita bahwa sejak SMA dia sudah ingin menggunakan cadar. Pada awalnya dia ingin kuliah di jurusan Kesehatan Masyarakat, namun tidak diterima. Dia malah diterima di Prodi PAI. Sebagai mahasiswi Prodi PAI berlatar belakang SMA, dia merasa Islamnya masih sangat kurang. Kemudian dia ikut beberapa kegiatan keagamaan seperti kajian LDK dan Tahajud Berantai. Dalam salah satu kesempatan, dia ikut kegiatan keislaman di Masjid Istiqlal dan mendapati ada salah satu *stand* “pembagian” jilbab besar gratis ukuran 130 cm dan 150 cm. Ketika dia mendatangi *stand* tersebut, salah seorang penjaganya memberikan jilbab berukuran 90 cm, karena melihat jilbab yang dipakai saat itu jilbab kecil. Pada saat dia menggunakan jilbab besar tersebut, si mbak penjaga stand bilang, “Dirimu tampak semakin cantik dan anggun dengan jilbab seperti ini”. Sejak saat itu dia menggunakan jilbab besar, dan sempat ingin memakai cadar namun tidak diizinkan oleh orang tuanya. Ketika memutuskan mondok, dia lebih banyak menggunakan jilbab standar, walau terkadang masih juga menggunakan jilbab besar. Dalam dua kesempatan wawancara, Eva menggunakan ukuran jilbab yang berbeda, standar dan lebar.

Lain lagi dengan Pipin dan Diyah, mahasiswi PAI dengan latar belakang SMK Akuntansi. Mereka mulai memakai jilbab standar pada saat SMP dan berlanjut hingga kelas 1 SMK. Perubahan terjadi ketika mereka naik kelas 2 SMK dan mulai aktif di

Rohis. Bahkan mereka sempat berkeinginan menggunakan cadar, namun di SMK tidak memungkinkan dan selain itu orang tua juga tidak setuju. Selain tampak semakin cantik, dengan jilbab besar mereka merasa lebih nyaman, dan tidak lagi merasa risih dengan pandangan laki-laki terhadap dada dan pinggulnya. Walaupun pada awal menggunakan pakaian besar dengan berangkap-rangkap merasa gerah dan tidak nyaman, tetapi lama kelamaan menjadi nyaman. Fenomena Eva, Pipin, dan Diyah ketika menggunakan jilbab besar cukup menarik untuk dianalisis lebih jauh. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa mereka menggunakan jilbab besar terkait informasi keagamaan yang diterimanya. Semakin beragam informasi yang didapat, maka ada peluang untuk berubah. Selain itu, prosesnya juga bertahap, mulai dari terlihat cantik, menjadi lebih nyaman karena tidak menjadi sasaran pandangan laki-laki, dan lain sebagainya.

Kedua, pandangan terhadap Ahmadiyah dan Syiah. Dalam konteks Islam Indonesia, isu tentang Ahmadiyah dan Syiah cukup sensitif, khususnya dalam 10 tahun terakhir di DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Para pengikut Ahmadiyah dan Syiah seringkali menjadi korban persekusi, baik yang bersifat fisik atau ujaran. Mereka menjadi korban kekerasan karena dianggap mencemari Islam. Ada pola menarik terkait upaya membungkam Ahmadiyah dan Syiah. Jika untuk membungkam Ahmadiyah dilakukan dengan elemen-elemen Islam yang cair, artinya tidak ada organisasi khusus yang melakukan eksekusi, maka untuk Syiah cenderung lebih tertata dan sistematis, seperti pembentukan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS). Di Jakarta, ANNAS dideklarasikan pada 25 Oktober 2015 (Padati, 2016) dan di Banten pada 19 Februari 2017 (ANNAS Indonesia, 2017).

Jejak anti Ahmadiyah dan Syiah juga dapat ditelusuri di kalangan mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, dan PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta. Berdasarkan hasil kuesioner dari total empat prodi tersebut, sebanyak 47% menganggap Ahmadiyah dan Syiah bukan Islam, 49% menganggap Islam, dan 4% tidak menjawab. Jika diurutkan berdasarkan tingginya pandangan bahwa Syiah dan Ahmadiyah bukan Islam di dapat data sebagai berikut: PAI UMJ (60%), PAI SMH Banten (48%), IIQ (47%), PAI Syarif Hidayatullah Jakarta (35%).

Secara komparatif, jumlah mahasiswa PAI yang menganggap Ahmadiyah dan Syiah bukan Islam sebanyak 47% berbanding dengan 49% yang menganggap Islam. Data tersebut cukup mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, khusus PAI UMJ, jumlah yang menganggap Syiah dan Ahmadiyah bukan Islam sangat tinggi, yakni sebanyak 60%. Bahkan, ketika dilontarkan pertanyaan dalam forum FGD apakah mereka perlu dilindungi dari ancaman kekerasan? Sebagian besar mengatakan selama tidak “mencemari” Islam perlu dilindungi. Celakanya, isu yang dikembangkan terkait Syiah dan Ahmadiyah selalu berkaitan dengan pelecehan atau penistaan Islam.

Ketiga, memilih pemimpin yang seiman (Muslim). Dalam konteks demokrasi, memilih pemimpin sesuai dengan pertimbangan subjektif masing-masing pemilih tentu dibenarkan dan tidak salah, termasuk mempertimbangkan dimensi kesamaan agama

atau keimanan. Dalam konteks pilihan yang demikian, maka setiap keputusan memilih berdasarkan agama atau keyakinan tidak dapat dikatakan bahwa mereka fundamentalis atau intoleran. Demikian juga dengan mereka yang tidak mempertimbangkan agama sebagai landasan untuk memilih juga tidak dapat dikatakan tidak islami atau liberal. Oleh karena itu, pilihan berdasarkan atau tidak berdasarkan agama perlu diperdalam sehingga mampu mengungkap apakah pilihan seiman atau seagama berlatar belakang islamisme atau tidak. Dalam konteks ini, memilih pemimpin yang seiman menarik untuk diajukan.

Di tiga prodi yang diteliti, secara umum mayoritas mengatakan harus memilih pemimpin yang seiman. Namun alasan di balik pilihan tersebut ternyata memiliki level ketebalan keislaman yang berbeda-beda. Di Prodi PAI UIN SMH Banten dan PAI UMJ, alasan kenapa memilih pemimpin muslim karena Islam mayoritas. “Masak mayoritas dipimpin minoritas atau minoritas memimpin mayoritas,” demikian kira-kira yang disampaikan. Artinya, keputusan memilih lebih didasari pertimbangan mayoritas dan minoritas, walaupun ukuran mayoritasnya berdasarkan agama. Sedangkan untuk PAI UIN Syarif Hidayatullah, alasan memilih pemimpin muslim sangat tebal nuansa keislamannya, yaitu untuk menyelamatkan akidah. Dengan perspektif ini, maka apabila ada dua calon pemimpin yang seagama dan yang berbeda agama, mereka akan tetap memilih yang seagama walaupun tidak kompeten untuk memimpin. “Menyelamatkan akidah,” demikian kata kuncinya. Khusus untuk PAI UIN Jakarta, mereka sepakat dengan konsep “menyelamatkan akidah,” sebagai dasar memilih pemimpin.

Keempat, sikap terhadap negara Barat. Salah satu ceruk islamisme yang cukup dalam adalah sikap anti Barat. Barat dengan semua nilai-nilai yang didukungnya, baik berdasarkan fakta atau sekadar imajinasi, dianggap sebagai ancaman terhadap Islam. Ketika diajukan pernyataan kepada mahasiswa Prodi UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta bahwa keterpurukan umat Islam merupakan bagian dari skenario Barat, 74% menyatakan setuju, 22% menyatakan tidak setuju, dan 4% tidak menjawab. Jika dilihat berdasarkan Prodi, mahasiswa Prodi UIN Syarif Hidayatullah 76% menyatakan setuju, 21% menyatakan tidak setuju, dan 3% tidak menjawab. Sebanyak 82% mahasiswa PAI UIN SMH Banten setuju, 16% menyatakan tidak setuju, dan 2% tidak menjawab. Sebanyak 77% mahasiswa PAI UMJ menyatakan setuju, 21% menyatakan tidak setuju, dan 2% tidak menjawab. Dan sebesar 63% dari mahasiswa PAI IIQ Jakarta menyatakan setuju, 22% menyatakan tidak setuju, dan 8% tidak menjawab.

Tingginya persentase mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta cukup mengkhawatirkan, terutama jika dikaitkan dengan masyarakat saat ini yang *borderless*. Memposisikan Barat sebagai ancaman akan melahirkan semangat Islamisme, dari konservatisme hingga gerakan terorisme. Penolakan terhadap Barat, tidak semata-mata Barat dalam artian fisik, tetapi juga Barat sebagai sebuah nilai yang berhadapan secara diametral dengan Islam, seperti liberalisme, kapitalisme, demokrasi, dan sekularisme.

Kelima, respons terhadap negara Islam. Menakar perlunya NKRI yang berasaskan Pancasila diganti dengan negara Islam menjadi isu yang timbul tenggelam dalam sejarah Islam Indonesia. Mimpi menjadikan NKRI sebagai negara Islam secara historis seumur dengan terbentuknya NKRI. Banyak upaya telah dilakukan baik secara fisik, politik, atau gabungan keduanya, walaupun hingga saat ini semua upaya tersebut gagal. Namun, jika perkembangan Islamisme yang semakin padat tidak disikapi secara cermat dan tepat, bukan mustahil pada akhirnya NKRI yang berasaskan Pancasila hanya akan menjadi catatan sejarah.

Kekhawatiran didasarkan kepada tiga hal, yaitu respons terhadap pernyataan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam; sistem pemerintahan Indonesia bukan *thaghut*; dan respons atas pernyataan Islam hanya tegak dengan sistem negara Islam (*khilafah*). *Satu*, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Dari survei didapatkan bahwa sebagian besar responden, yaitu 88%, berpendapat setuju bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Hanya saja, jumlah yang tidak setuju juga relatif tinggi, yaitu mencapai 11%. Jika dilihat berdasarkan prodi, 97% Mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah setuju dengan pernyataan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan nilai Islam, dan hanya 2% yang menyatakan tidak setuju; 94% mahasiswa PAI UIN SMH Banten menyatakan setuju, dan 4% menyatakan tidak setuju; 70% mahasiswa PAI UMJ menyatakan setuju, dan 30% menyatakan tidak setuju; dan 86% mahasiswa PAI IIQ Jakarta menyatakan setuju dan 14% menyatakan tidak setuju. Berdasarkan data tersebut, persentase jumlah mahasiswa PAI negeri lebih tinggi dari PAI swasta.

Dua, sistem pemerintahan Indonesia bukan *thaghut*. Setelah mendapatkan informasi tentang pandangan mahasiswa PAI atas kesesuaian Pancasila dengan Islam, kita beranjak untuk mengetahui pandangan bahwa Indonesia bukan negara *thaghut*. Data dari empat prodi menunjukkan bahwa 41% mahasiswa PAI di empat prodi yang diteliti menyatakan tidak setuju dengan pernyataan bahwa Indonesia bukan Negara *thaghut*, 54% menyatakan setuju, dan 5% tidak menjawab. Jika dilihat berdasarkan prodi, sebanyak 27% Mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan tidak setuju, 69% menyatakan setuju, dan 4% tidak menjawab; sebanyak 42% mahasiswa PAI UIN SMH Banten menyatakan tidak setuju, 52% menyatakan setuju, dan 6% tidak menjawab; sebanyak 55% mahasiswa PAI UMJ menyatakan tidak setuju, 38% setuju, dan 7% tidak menjawab; dan sebanyak 43% mahasiswa PAI IIQ Jakarta menyatakan tidak setuju, 51% setuju, dan 6% tidak menjawab. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa Indonesia bukan negara *thaghut* jumlahnya sangat besar 41%. Sedangkan jika dilihat berdasarkan prodi, yang terendah menganggap Indonesia sebagai negara *thaghut* adalah mahasiswa Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebesar 27% , dan dengan persentase tertinggi adalah mahasiswa PAI UMJ, yaitu sebesar 55%. Jika dilakukan gradasi pandangan terkait Indonesia bukan *thaghut* akan didapatkan data: PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (69%); PAI UIN SMH Banten (52%), PAI IIQ (51%), dan PAI UMJ (38%).

Tiga, Islam hanya tegak dengan sistem Negara Islam (*khilafah*). Setelah mengetahui tentang pandangan mahasiswa Prodi PAI terkait kesesuaian antara Pancasila dan Islam, serta mengukur pandangan mereka tentang Indonesia sebagai negara *thaghut*, selanjutnya perlu “diukur” mimpi mereka tentang perlunya negara Islam untuk menegakkan Islam. Dari empat Prodi PAI, didapatkan bahwa 39% setuju perlunya negara Islam untuk menegakkan Islam, 59% tidak setuju, dan 2% tidak menjawab. Jika diiris berdasarkan prodi, akan diketahui bahwa 24% Mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah menginginkan negara Islam, 74% tidak setuju, dan 2% tidak menjawab; 49% mahasiswa PAI UIN SMH Banten menginginkan negara Islam, 47% tidak setuju, dan 4% tidak menjawab; 50% mahasiswa PAI UMJ menginginkan negara Islam, 48% tidak setuju, dan 2% tidak menjawab; dan 35% mahasiswa Prodi PAI IIQ Jakarta menginginkan negara Islam, 63% tidak setuju, dan 2% tidak menjawab. Jika melihat data tersebut, maka didapatkan data bahwa persentase tertinggi yang menginginkan negara Islam adalah PAI UMJ (50%), diikuti SMH Banten (49%), PAI IIQ (35%), dan PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (24%).

Untuk mendirikan negara Islam (*khilafah Islamiyah*) tersebut, data survei menunjukkan bahwa sebanyak 7% dari responden menyatakan setuju jika kekerasan fisik bahkan aksi bunuh diri digunakan untuk menegakkan negara Islam. Jika dilihat berdasarkan prodi, datanya sebagai berikut: PAI UIN Syarif Hidayatullah terdapat 8% setuju, 90% tidak setuju, dan 2% tidak menjawab; PAI UIN SMH Banten terdapat 10% setuju dan 90% tidak setuju; PAI UMJ sebanyak 5% setuju, 93% tidak setuju, dan 2% tidak menjawab; dan IIQ Jakarta 4% menyatakan setuju, dan 96% tidak setuju. Jika dilihat proporsinya yang 7%, maka jelas bahwa di PAI radikalisme sedang memasuki musim semi.

Berdasarkan pandangan Mahasiswa PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PAI UIN SMH Banten, PAI UMJ, dan PAI IIQ Jakarta tentang kesesuaian Pancasila dengan Islam (11% tidak setuju), pandangan mereka bahwa pemerintah Indonesia bukan *thaghut* (41% tidak setuju), perlunya negara Islam untuk menegakkan Islam (39% menyatakan setuju), dan persetujuan untuk menegakkan negara Islam dengan kekerasan fisik atau aksi bunuh diri (7%), tampaknya radikalisme Islam di Indonesia merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai. Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena mereka adalah para calon guru PAI yang akan mentransmisikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat (murid-muridnya).

Musim semi radikalisme di Prodi PAI tidak terjadi secara tiba-tiba dan tanpa sebab. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu adanya faktor pendorong (*push*) dan penarik (*pull*) yang bekerja pada level individu maupun masyarakat (PEER, n.d.). Faktor pendorong pada ranah individu dapat berupa perasaan terancam oleh globalisasi terhadap identitas diri atau kelompoknya, kegersangan hidup yang mendorong seseorang untuk melakukan “*hijrah*”, pengalaman pribadi yang pahit, dan perasaan terasing yang mendorong seseorang untuk bertindak agar eksistensinya mendapatkan pengakuan.

Sedangkan faktor pendorong pada ranah sosial dapat berupa ancaman terhadap kelompoknya, baik secara nyata atau sekadar persepsi, seperti isu yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok Islam tertentu yang menyatakan bahwa pemerintah saat ini memusuhi Islam, panggilan atau kewajiban untuk membela dan menyelamatkan Palestina dari agresi militer Israel, dan rasa dendam kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap merusak dan menyakiti umat Islam, seperti keberadaan Syiah dan Ahmadiyah.

Sedangkan faktor penarik munculnya radikalisme karena pergaulan dengan orang-orang yang radikal, baik secara langsung atau tidak langsung. Kasus teror bom bunuh diri di Surabaya yang dilakukan oleh satu keluarga merupakan contoh nyata betapa lingkungan teroris akan melahirkan para calon teroris. Faktor penarik lainnya adalah keinginan untuk menjadi ahli surga dengan hidup di negara Islam, seperti yang dialami oleh Nurshadrina, seorang perempuan dari Indonesia yang secara sadar dan suka rela bergabung dengan ISIS. Dia tertarik bergabung dengan ISIS setelah melihat video-video propaganda yang diproduksi oleh ISIS dan simpatisannya. Mereka mengajak semua Muslim untuk hijrah dan hidup dalam sistem pemerintahan Islam. Anak-anak akan terjamin kehidupannya, sekolah gratis, biaya ke Suriah akan diganti, semua hutang ditanggung, disediakan pekerjaan dengan gaji tinggi, dan dijamin masuk surga (Erdianto, 2017).

Selain itu, fenomena berseminya radikalisme di Prodi PAI tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses bertahap dan bahkan bergerak dengan sangat lambat. Adanya keinginan untuk berislam secara *kaffah*, yaitu untuk hidup sebagaimana yang tertulis dalam al-Quran dan Hadis, serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa melakukan kontekstualisasi merupakan proses Islamisasi yang jika terus berlanjut dapat berujung kepada radikalisasi. Salah seorang informan dalam penelitian ini, sebut saja namanya Jaja, mahasiswa PAI, aktif di PMII tetapi sempat ikut kajian-kajian keislaman yang dilaksanakan oleh LDK dan HTI (sebelum dilarang). Pada sore hari di sela-sela wawancara, saya mengajaknya makan di sekitaran UIN Syarif Hidaytaullah. Kami sama-sama makan rendang dan minum teh hangat. Saya perhatikan dia menggunakan tiga jari tangan untuk makan. Setelah selesai makan, dia *mengoreti* sisa-sisa makanan di piringnya, dan “menjilati” jari-jari tangannya sampai bersih sama sekali. Jaja menjelaskan bahwa yang dia lakukan dalam rangka mengamalkan sunah nabi. Tentu saja, perbincangan tentang islamisme tidak boleh berada pada stigma salah dan benar dalam beragama, karena basis dari benar dan tidaknya dalam beragama adalah keyakinan, tetapi perlu diletakkan pada konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multi agama dan multi budaya. Dengan kata lain, Islamisme dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar NKRI yang multi agama dan multi religius. Dalam konteks Prodi PAI, semangat ini disebut selaras dengan semangat keislaman, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Dalam konteks studi agama, ada tiga problem beragama, yaitu problem informasi, interpretasi, dan aksi (Salehudin, 2018). Radikalisme sebagai fenomena baru merupakan

manifestasi dari munculnya informasi keberagamaan baru yang berbeda dari model informasi keberagamaan mainstream, atau bisa saja keberagamaan mainstream yang mengalami pemekaran, penguatan, pengerasan, dan/atau penyesuaian terhadap kondisi yang terus berubah. Dalam konteks ini, menarik untuk menelusuri konteks sosial-budaya dan ekonomi-politik tumbuhnya radikalisme, aktor-aktor yang mendorongnya, dan media-media yang digunakan untuk menyemai ide radikalisme tersebut. Informasi yang diterima tentu akan menyebabkan problem lanjutan dalam beragama, yaitu problem interpretasi. Bagaimana seseorang menginterpretasikan teks-teks keagamaan tidak semata-mata oleh teks itu sendiri, tetapi juga faktor-faktor lain jenis pendidikan, strata sosial, afiliasi politik, dan lain sebagainya. Bagaimana menginterpretasikan teks-teks keagamaan juga akan melahirkan problem ketiga, yaitu problem tindakan. Orang yang memutuskan bercadar, menginginkan untuk mengubah NKRI menjadi negara Islam, atau bahkan berela hati untuk melakukan kekerasan dalam rangka mendirikan negara Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan bebas penggunaannya, tetapi perlu juga menelisik lebih jauh tentang informasi keislaman seperti apa yang didapatkan, dan kepentingan apa yang melatarbelakangi sehingga mereka memutuskan untuk menggunakannya.

Salah Resep Mengatasi Problematika PAI

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola PAI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN SMH Banten, dan UMJ, dapat diambil pemahaman bahwa mereka sebenarnya telah memahami problem akut yang dihadapi oleh Prodi PAI, dan telah berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Mereka sudah mampu mendiagnosis penyakitnya, namun obat yang diresepkan kurang tepat. Kesalahan dalam memberikan resep obat tidak semata-mata karena mereka tidak tahu, tetapi disengaja karena ada faktor-faktor tertentu yang membuatnya tidak berdaya. Akibatnya, alih-alih disembuhkan, penyakit PAI bahkan menjadi semakin akut.

Beberapa program yang dijalankan untuk mengatasi masalah Prodi PAI, baik pada ranah produksi maupun pada ranah Islamisme, sedikitnya ada empat hal. *Pertama*, program baca kitab kuning sebagai matakuliah dan pada saat ujian komprehensif, sebagaimana dilakukan oleh Prodi PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program ini sangat bagus sebagai “portal” untuk memastikan bahwa alumninya memiliki kemampuan untuk membaca kitab kuning apa pun latar belakang pendidikannya. Oleh karena adanya kebijakan ini, mahasiswa PAI UIN Jakarta banyak yang mengikuti kursus bahasa Arab atau memilih untuk belajar di pondok pesantren di sekitar UIN Syarif Hidayatullah untuk memperdalam bahasa Arabnya. Hanya saja, ternyata tidak semua dosen keislaman menerapkan dalam perkuliahan, sehingga mahasiswa yang tidak mampu baca kitab kuning akan memilih dosen yang tidak mensyaratkan membaca kitab kuning di kelas, sebagaimana disampaikan oleh Diah (bukan nama sebenarnya) pada saat wawancara. Demikian juga dengan ujian komprehensif membaca kitab kuning, idenya sangat bagus

namun menyebabkan mahasiswa terhambat lulus. Selain itu, untuk alasan akreditasi, mereka yang beberapa kali tidak mampu akan mendapatkan dispensasi. Bahkan, ada dosen yang tidak sepakat jika membaca kitab kuning dijadikan portal untuk memastikan yang lewat benar-benar mampu membaca kitab kuning.

Kedua, program kelas *bilingual* dan *excellent class*. Program ini sangat gagah dan keren untuk melahirkan para calon guru sesuai dengan visi dan misi prodi. Program ini sangat bagus dalam rangka mendorong dan memfasilitasi mahasiswa agar mampu berbahasa Inggris dan Arab secara bagus. Hanya saja, program ini cenderung berorientasi hanya pada marwah lembaga, bukan pada mahasiswa secara umum, apalagi yang dipilih untuk masuk kelas unggulan tersebut adalah mahasiswa-mahasiswa yang sejak awal memang memiliki kemampuan bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris. Jika yang difasilitasi adalah mereka yang lancar berbahasa Arab dan/atau bahasa Inggris, bagaimana dengan mereka yang berasal dari SMA atau SMK, atau yang lemah dalam bahasa Arab dan/atau Inggris? Secara umum, Prodi PAI tidak memiliki program secara khusus untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab mahasiswanya.

Ketiga, menjadikan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai lembaga intra-kampus. Secara teori, menjadikan LDK sebagai organisasi intra-kampus sangat strategis untuk memastikan agar organisasi keagamaan tidak liar dan menjadi sarang kelompok Islam yang membahayakan NKRI. Sebagaimana yang terjadi di UIN Syarif Hidayatullah dan UIN SMH Banten, LDK merupakan kepanjangan tangan organisasi ekstra kampus, yaitu KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) yang dalam beberapa aksinya selalu menyuarakan *khilafah Islamiyah* (Pengurus Pusat KAMMI, n.d.). Bahkan, dalam beberapa kegiatan yang dilakukan, LDK seringkali mendatangkan politisi PKS atau ustaz-ustaz hijrah. Niat hati untuk menjinakkan dengan menjadikannya lembaga intrakampus, tetapi karena tidak dikelola dengan baik, LDK malah mendapatkan dukungan dana, sarana, dan prasarana secara legal untuk mentransmisikan ide-idenya.

Keempat, program seperti *qira'atul Qur'an*, *tahfizul Qur'an*, *tahsinul Qur'an*, dan bimbingan ibadah cukup bagus untuk memastikan bahwa mahasiswa PAI memiliki penghayatan dalam berislam. Hanya saja, jika tidak ditopang dengan pemahaman kritis dan penguasaan yang memadai terhadap ilmu-ilmu keislaman, program-program tersebut akan menjadi jalan bagi menguatnya konservatisme Islam. Para mahasiswa PAI hanya akan sibuk untuk menampilkan aspek simbolik Islam, seperti berjilbab besar/cadar, hafal al-Quran tanpa pemahaman yang memadai, dan sekian identitas keislaman lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mayoritas yang bersemangat mengikuti program-program tersebut adalah mereka yang aktif di LDK dengan jilbab besar sebagai penanda dan sedikit anggota HMI. Para calon guru PAI harus didorong agar memiliki "alat" untuk membaca sumber-sumber keislaman secara langsung, memiliki sikap keberagaman yang kritis, moderat, transformatif, dan berwawasan NKRI.

Catatan Penutup

Jika berbicara tentang kompetensi guru PAI sebagaimana dirumuskan dalam visi-misi dan tujuannya, maka akan didapatkan kenyataan betapa pentingnya keberadaan Prodi PAI, terutama untuk mempersiapkan para ahli agama Islam yang memiliki kemampuan untuk mengajar. Prodi PAI merupakan sebuah sistem produksi yang dibuat untuk melahirkan ustaz-ustazah (baca: guru) yang memiliki kecakapan mengajar sebagaimana tertuang dalam visi, misi, dan tujuannya. Hanya saja, dalam praktiknya apa yang tertulis dalam visi-misi dan tujuannya tersebut tidak sertamerta dapat direalisasikan. Sebagai sebuah sistem, maka hasil yang dicapai merupakan akibat dari keterjalinan secara berkait kelindan antara beragam faktor, seperti *raw input* mahasiswa, model *rekrutmen*, proses pembelajaran, kapasitas dosen, kurikulum, dan faktor lingkungan.

Secara umum, mahasiswa PAI memiliki kualifikasi akademik unggul. Hanya saja kualifikasi akademik unggul tersebut tidak sepenuhnya ditopang oleh pengetahuan dan pemahaman dasar keislaman yang memadai untuk menjadi calon guru PAI. Hal ini disebabkan karena sekitar 30% mahasiswa Prodi PAI berlatar belakang SMA/SMK non keagamaan dan sekitar 58% memiliki kemampuan bahasa Arab rendah. Selain itu, kurikulum PAI hanya memfasilitasi calon guru PAI hanya untuk menyampaikan materi pendidikan agama Islam pada level SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, bukan untuk menguasai materi keislaman secara mendalam dan kritis. Lebih lanjut, kurikulum juga mengakibatkan proses pembelajaran menjadi gersang, apalagi para dosen matakuliah keislaman cenderung hanya berfokus pada penyampaian materi perkuliahan dan kurang memberi ruang untuk mendiskusikan fenomena keislaman terbaru. Kondisi ini menyebabkan mereka mencari informasi keagamaan dari internet atau mengikuti group-group media sosial. Selain itu, para dosen juga kurang peka terhadap munculnya islamisme dan radikalisme, sehingga tidak ada kebijakan yang didesain secara sadar untuk menangkalnya. Bahkan, kebijakan yang diambil berpotensi menyuburkan konservatisme, intoleransi, dan radikalisme ketika kurang ditata dengan baik.

Dalam konteks islamisme, Prodi PAI tampaknya sedang menyambut musim semi radikalisme. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase yang menganggap Pancasila tidak sesuai dengan Islam (11%), Indonesia negara *thaghut* (41%), mimpi tentang perlunya negara Islam untuk menegakkan Islam (39%), dan menyetujui cara kekerasan untuk merealisasikan (7%). Dikatakan musim semi, karena jika tidak dilakukan tindakan yang antisipatif dan komprehensif, bukan mustahil jumlah mahasiswa PAI yang menganggap Pancasila tidak sesuai dengan Islam, Indonesia negara *thaghut*, perlunya negara Islam untuk menegakkan Islam, dan menyetujui cara kekerasan untuk merealisasikannya akan semakin tinggi. Dalam konteks ini, keberadaan mahasiswa PAI yang *notabene* calon guru PAI menjadi sangat penting dan strategis, karena mereka yang akan menjadi *transmitter* corak keislaman bagi siswa-siswanya.

Dengan mengandaikan bahwa sistem produksi PAI dapat menghasilkan guru yang memiliki kompetensi profesional, pengajaran, sosial, dan emosional, sedikitnya ada lima

hal yang perlu dilakukan. *Pertama*, memperbaiki pola rekrutmen mahasiswa PAI. Sejak awal harus dipastikan bahwa calon mahasiswa PAI harus memiliki potensi akademik unggul, dan memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman agama yang memadai, serta memiliki kemampuan bahasa arab yang baik. *Kedua*, merombak kurikulum PAI. Kurikulum PAI harus didesain agar mampu memfasilitasi bibit-bibit unggul mahasiswa PAI agar menjadi guru PAI (ustaz/ustazah) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman keislaman yang luas dan mendalam pada satu sisi, dan memiliki kemampuan pedagogis yang mumpuni pada sisi yang lain. *Ketiga*, perlunya membekali dosen PAI dengan pemahaman keislaman yang *up to date*, sehingga mahasiswa tidak menggantungkan pengetahuan keislamannya kepada internet dan media sosial. *Keempat*, perlunya menerapkan pembelajaran keislaman yang tidak saja kritis dan *up to date*, tetapi juga berbasis kepada keragaman agama, suku, dan budaya masyarakat Indonesia. Sikap intoleran dapat muncul karena banyaknya “tembok-tembok” keagamaan yang dibangun untuk membatasi satu kelompok dengan kelompok-kelompok lainnya. Materi agama Islam harus mampu menjadi jembatan bagi keragaman. *Kelima*, perlunya kebijakan fundamental terkait kebutuhan guru PAI. Di Indonesia, ada 627 lebih Prodi PAI yang setiap tahun meluluskan calon guru PAI, namun belum ada pasti berapa kebutuhan guru PAI setiap tahunnya. Tidak boleh lagi Prodi PAI hanya berfokus kepada penerimaan sejumlah mahasiswa (berapa kelas) tanpa mempertimbangkan daya serap pasar. Prodi PAI perlu membuat *tracer study* untuk mengetahui keterserapan alumninya pada satu sisi, dan mendapatkan *feedback* bagi perbaikan prodinya, seperti revisi kurikulum. Jika memang jumlah guru yang diproduksi sudah melebihi kebutuhan, maka tahap selanjutnya perlu dibuat regulasi tentang moratorium pembukaan Prodi PAI baru dan/atau pembatasan jumlah mahasiswa PAI.

Referensi

- Kurikulum Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun, 2016.
- Kurikulum Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2010.
- Mudzakkir, Amin, dkk. 2018. *Menghalau Ekstremisme: Konsep & Strategi Mengatasi Ekstremisme Kekeerasan di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Hikam, Muhammad AS. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*. Jakarta: Penerbit buku Buku Kompas.
- Pedoman Akademik Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018-2019.
- Pedoman akademik Akademik program Program strata Strata-1 universitas Universitas Islam negeri Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017/2018, biro administrasi akademik kemahasiswaan dan kerjasama universitas Islam negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

Revisi Kurikulum Jurusan PAI UIN SMH Banten Tahun 2014.

Hefner, Robert W (ed),). 2009. *Making Modern Muslim: the Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Honolulu: university University of Hawaii pressPress.

Salehudin, Ahmad. 2018. "Theologizing Farming: Religiosity and Economic Rationality of Muslim Peasants in The the Dieng Mountains," Sekolah Pasca Sarjana UGM: Disertasi.

ANNAS Indonesia. 2017. "Deklarasi dan Penetapan Pengurus ANNAS Banten." ANNAS Indonesia. 2017. <http://www.annasindonesia.com/read/782-deklarasi-dan-penetapan-pengurus-annas-banten>.

Chairunnisa, Ninis. 2018. "Pelaku Bom Di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya." Tempo. May 13, 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1088460/pelaku-bom-di-surabaya-satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya>.

Erdianto, Kristian. 2017. "Eks WNI Simpatisan ISIS: Perempuan Hanya Dianggap 'Pabrik Anak' - Kompas.Com." September 15, 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/15/08523811/eks-wni-simpatisan-isis-perempuan-hanya-dianggap-pabrik-anak>.

Kuwado, Fabian Januarius. 2013. "Lurah Susan Ditolak Warga, Jokowi Tanggapi Dingin." Kompas.Com. September 25, 2013. <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/25/1725460/Lurah.Susan.Ditolak.Warga.Jokowi.Tanggapi.Dingin>.

Padati, Kudo. 2016. "Aliansi Nasional Anti Syiah DKI Jakarta Resmi Dideklarasikan." Kiblat.Net. October 25, 2016. <https://www.kiblat.net/2015/10/25/aliansi-nasional-anti-syiah-dki-jakarta-resmi-dideklarasikan/>.

PEER. n.d. "Push and Pull Factors." Preventing Extremism through Educational Research (PEER). Accessed November 29, 2018. <https://www.mcgill.ca/peer/key-terms/push-and-pull-factors>.

Pengurus Pusat KAMMI. n.d. "Tentang Kammi." *Pengurus Pusat KAMMI* (blog). Accessed January 29, 2019. <https://www.kammi.or.id/tentang-kammi>.

PT Viva Media Baru. 2016. "Ditolak Jadi Kapolda Banten, Ini Kata Eks Ajudan Jokowi – VIVA." October 13, 2016. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/834008-ditolak-jadi-kapolda-banten-ini-kata-eks-ajudan-jokowi>.

Rifa'i, Bahtiar. 2018. "Patung Pahlawan Sultan Ageng Dibongkar Dan Dibuang Karena Syirik?" Detiknews. November 10, 2018. <https://news.detik.com/read/2018/11/10/155030/4296025/10/patung-pahlawan-sultan-ageng-dibongkar-dan-dibuang-karena-syirik>.

Rochmanuddin. 2014. "Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI, FPI Demo Balaikota Jakarta Hari Ini." Liputan6.Com. September 24, 2014. <https://www.liputan6.com/news/>

[read/2109471/tolak-ahok-jadi-gubernur-dki-fpi-demo-balaikota-jakarta-hari-ini.](#)

Setiawan, Sakina Rakhma Diah. 2018. "2 Wanita Diamankan Karena Diduga Akan Menusuk Polisi Di Mako Brimob." Kompas.Com. May 12, 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/12/21450571/2-wanita-diamankan-karena-diduga-akan-menusuk-polisi-di-mako-brimob>.

Sitepu, Mehulika. 2018. "Enam Dari Sepuluh Guru Muslim 'Intoleran', Kemajemukan Harus Masuk Penilaian Akreditasi," October 18, 2018, sec. Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45887762>.

Tempo.co. 2017. "Masjid Tolak Salatkan Pemilih Ahok, Begini Reaksi Warga." Tempo.Co. February 25, 2017. <https://metro.tempo.co/read/850115/masjid-tolak-salatkan-pemilih-ahok-begini-reaksi-warga>.

Tribun. 2018. "Istri Terduga Teroris, Dicerai Jika Tak Bercadar dan Aneh Saat Belanja Sayur." Tribun Jateng. May 17, 2018. <http://jateng.tribunnews.com/2018/05/17/istri-terduga-teroris-dicerai-jika-tak-bercadar-dan-aneh-saat-belanja-sayur>.



